



2023

PROFIL EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Provinsi Jambi



HANBAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Profil Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka tugas Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-34/PB/2018 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kami menyadari bahwa Profil Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini sangat diharapkan. Dan kepada semua pihak baik Pemerintah Daerah dan SKPD lingkup Kabupaten/Kota/Provinsi Jambi, BPS Provinsi Jambi, Perwakilan Bank Indonesia Jambi, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, sarana dan inspirasi dalam rangka penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih.

Akhir kata, kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.



Ditandatangani secara elektronik
Burhani AS



Burhani AS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
I. Pendahuluan	4
a. Latar Belakang	4
b. Tujuan	5
c. Ruang Lingkup	5
d. Metode Pengumpulan Data	5
II. Analisis Karakteristik Ekonomi Regional	6
a. Indikator ekonomi daerah	6
b. Indikator kinerja keuangan daerah	11
c. Prospek kegiatan ekonomi unggulan	12
d. Analisis kemandirian fiskal daerah	27
e. Analisis peranan pusat di daerah	28
III. Analisis Kondisi Keuangan Regional	29
a. Penjelasan singkat APBD masing-masing Pemerintah Daerah	29
b. Perbandingan Indikator Ekonomi dan Keuangan Antar Daerah dan Pusat	30
c. Matriks perbandingan sektor ekonomi dan komoditas unggulan antar daerah	38
d. Matriks perbandingan pendapatan daerah dan pusat (Alokasi dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan)	38
e. Matriks perbandingan belanja antar daerah dan pusat (Alokasi dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan)	48
f. Matriks perbandingan rasio keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat	51
IV. Analisis Tata Kelola Keuangan Pusat dan Daerah	53
a. Matriks klasifikasi dan perbandingan peraturan terkait tata kelola keuangan daerah antar daerah	53
b. Matriks perbandingan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan pusat dari peraturan pelaksanaan APBN	61
V. Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah	63
a. Matriks perbandingan data temuan/catatan penting/ rekomendasi BPK atas LKPD terkait pelaksanaan anggaran daerah antar daerah	63
b. Matriks perbandingan data temuan/catatan penting/rekomendasi BPK atas LKPD terkait pelaksanaan anggaran daerah dengan data temuan/catatan penting/ rekomendasi BPK atas LKPP	64
VI. Penutup	66
a. Kesimpulan	66
b. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	67

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik di pusat dan juga daerah. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah, setiap daerah telah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan hasil penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efisien dan efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, desentralisasi fiskal berperan penting khususnya dalam mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diperlukan khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah diatur dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 yang memuat tentang azas umum keuangan daerah, struktur APBD, pertanggungjawaban APBD hingga pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah dan menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun alokasi dana perimbangan. Sumber keuangan pemerintah, belanja, tantangan, dan potensi unggulan daerah serta kondisi daerah secara umum sebagaimana ditampilkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Struktur APBD secara umum terdiri dari pendapatan, belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. Belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, dan belanja hibah. Struktur/profil dari keuangan daerah ini akan diperbandingkan antar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah disusun dengan harapan memberikan informasi pada pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi dan

keuangan antar pemerintah daerah yang berada pada provinsi Jambi, serta pembelajaran pada masyarakat/stake holders untuk lebih peduli pada:

1. Arah rencana kerja dan langkah-langkah pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan pembangunan antara lain: infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan tersebut yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah Tahun 2021 adalah untuk:

1. Memberikan informasi terkait gambaran umum fiskal atau APBD Pemerintah Daerah kepada *stakeholders*; dan
2. Sebagai informasi awal penyusunan kajian atau tinjauan fiskal keuangan daerah.

c. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup pembahasan yang disajikan dalam profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah meliputi data yang berasal dari APBD TA. 2023, 12 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kabupaten dan Kota, serta situs resmi BPK, BPKP, dan instansi pemerintah lainnya.

d. Metode Pengumpulan Data

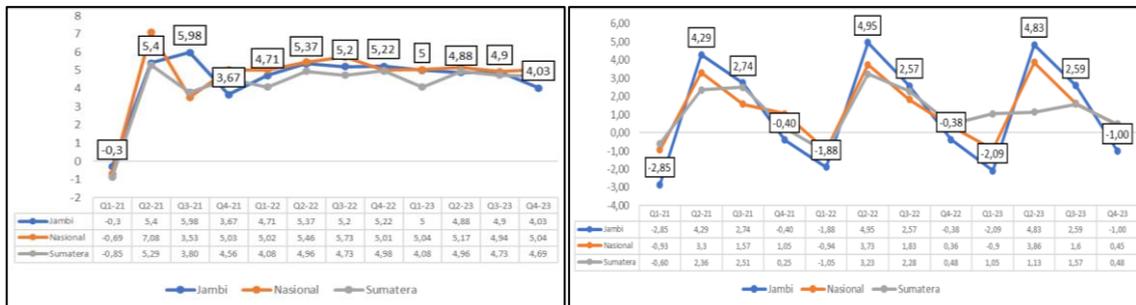
Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan Profil Keuangan Daerah Sumber Data merupakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui dialog/wawancara pada saat meminta/mendapatkan data APBD dan dokumentasi dari sumber data BPS.

II. Analisis Karakteristik Ekonomi Regional

a. Indikator ekonomi daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

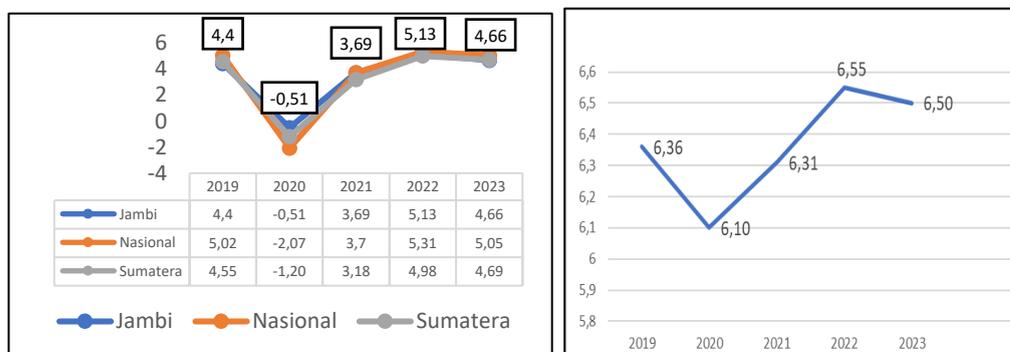
Grafik 2.1 *Pertumbuhan Ekonomi Jambi, Kawasan Sumatera, dan Nasional secara (q-to-q) (atas) dan (y-on-y) (bawah)*



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,03% (y-on-y) dan mengalami kontraksi sebesar -1,00% (q-to-q). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sedikit mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (y-to-y) masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera (4,69%) dan Nasional (5,04%).

Grafik 2.2 *Pertumbuhan Ekonomi Jambi, Kawasan Sumatera, dan Nasional (c-to-c) (kiri) dan Kontribusi Ekonomi Jambi Terhadap Kawasan Sumatera (kanan)*



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Perekonomian Provinsi Jambi 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp293,73 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp79,8 juta atau US\$5.239,4. Ekonomi Provinsi Jambi, secara (c-to-c) tumbuh sebesar 4,66%, melambat dari tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,13%. Secara total, perekonomian Jambi memberikan kontribusi sebesar 6.50% dari total perekonomian kawasan Sumatera.

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) (c-to-c) (dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,67	5	5,61	31,56	30,25	31,83
B	Pertambangan dan Penggalian	2,13	7,82	0,07	14,21	19,29	15,31
C	Industri Pengolahan	1,27	3,05	4,16	10,24	9,77	9,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,08	11,66	12,15	0,07	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,13	3,15	0,21	0,14	0,13	0,13
F	Konstruksi	7,94	-0,88	7,98	7,89	6,89	7,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,92	5,41	8,87	12,51	12,16	13,3
H	Transportasi dan Pergudangan	5,35	16,92	8,29	2,61	2,85	3,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,97	11,09	8,76	1,11	1,05	1,09
J	Informasi dan Komunikasi	3,84	7,25	7,5	4,1	3,68	3,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,36	-0,72	1,22	2,58	2,33	2,27
L	Real Estate	3,16	4,22	3,3	1,62	1,5	1,49
M	Jasa Perusahaan	4,03	15,13	16,84	1,19	1,29	1,49
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,2	-0,65	2,97	4,31	3,59	3,52
O	Jasa Pendidikan	1,22	2,02	2,54	3,53	3,11	3,08
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,55	-2,4	4,34	1,43	1,19	1,21
Q	Jasa lainnya	0,53	7,81	8,54	0,91	0,86	0,95
Produk Domestik Bruto (PDRB)		3,69	5,13	4,66	100	100	100

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Dilihat dari jenis lapangan usaha, sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa perusahaan sebesar 16,84%. Pertumbuhan pada jenis lapangan usaha ini menandakan adanya peningkatan daya beli masyarakat sehingga permintaan akan barang dan komoditas juga meningkat. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi juga terdapat pada Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,15%, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 8,87%, diikuti Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 8,76%, Jasa Lainnya sebesar 8,54%, sedangkan sektor Transportasi dan Pergudangan naik sebesar 8,29% yang menandakan peningkatan mobilitas dan pergerakan warga Provinsi Jambi.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir belum mengalami perubahan yang signifikan. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,83%. Sektor ini cukup stabil dan tumbuh 5,22% dengan didorong oleh peningkatan produksi komoditas pertanian. Bila dikaitkan dengan transformasi struktural, maka dominasi sektor pertanian ini mengindikasikan tidak terjadinya perubahan struktur perekonomian secara ideal. Seharusnya, dengan usia Provinsi

Jambi saat ini, lapangan usaha industri dan lapangan usaha lain di sektor sekunder dan tersier sudah bisa bergerak maju mendekati share sektor primer. Namun selama tiga tahun terakhir share lapangan usaha industri dan beberapa lapangan usaha lain di sektor sekunder dan tersier mengalami penurunan. Pemerintah harus lebih serius untuk memberikan dukungan baik dari sisi kemudahan perizinan, insentif fiskal yang diberikan, maupun infrastruktur yang diperlukan. Hal ini sangat penting untuk memprioritaskan penarikan investor ke Provinsi Jambi.

Melihat kondisi nasional yang sudah berada pada fase industrialisasi, maka Provinsi Jambi harus memulai menumbuhkan usaha-usaha dalam rangka hilirisasi produk-produk lokal agar memiliki nilai tambah dan mengantisipasi kebijakan nasional yang sifatnya membatasi ekspor bahan mentah. Data Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian timur mencatat mayoritas dari nilai ekspor merupakan komoditas bahan mentah/bahan baku, sehingga hilirisasi menjadi sangat penting dan disegerakan pelaksanaannya agar nilai tambah dari komoditas unggulan dapat menciptakan dorongan yang lebih besar bagi perekonomian, dengan tetap fokus pada sektor pertanian melalui perluasan implementasi modernisasi pertanian rakyat yang didukung oleh ketersediaan konektivitas angkutan yang handal. Implementasi modernisasi pertanian rakyat sebetulnya merupakan salah satu indikator pelaksanaan program prioritas nasional yaitu Pembangunan Unit Pengolahan Minyak Sawit Industri Perdesaaan Dekat Perkebunan yang masih harus terus diupayakan untuk direalisasikan.

Tabel 2. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)

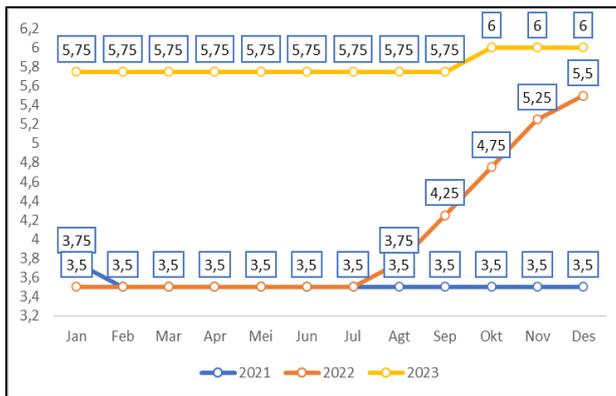
Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	102.858	114.393	123.854	67.206	70.206	73.149
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.330	1.491	1.701	855	907	1.001
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.332	18.953	19.813	10.955	11.122	11.341
Pembentukan Modal Tetap Bruto	51.574	55.637	64.463	35.216	36.055	39.667
Perubahan Inventori	2.760	2.139	2.420	1.721	1.287	1.272
Ekspor Barang dan Jasa	153.928	187.806	188.312	106.329	110.868	108.957
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	98.719	104.102	106.833	68.455	68.726	66.118
Produk Domestik Regional Bruto	232.064	276.316	293.729	153.825	161.718	169.268

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Dilihat dari struktur kelompok pengeluaran, perekonomian Jambi tumbuh pada komponen pengeluaran. Realisasi pada Komponen PK-LNPRT sebesar Rp1.001 miliar atau tumbuh 10,31%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp39.667 miliar atau tumbuh sebesar 9,11%, Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga sebesar Rp.73.149 miliar atau sebesar 4,02%, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp11.341 miliar atau 1,93%. Struktur PDRB Provinsi Jambi didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

2. Suku Bunga

Grafik 2.3 Suku Bunga BI 7-Day Repo Rate Tahun 2021-2023



Suku bunga acuan adalah besaran bunga yang ditetapkan bank sentral setiap bulannya untuk menjadi acuan produk simpanan dan pinjaman bank serta lembaga keuangan lainnya. Selama tahun 2023, Bank Indonesia (BI) selaku pemegang kewenangan atas kebijakan moneter cenderung

menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dengan menaikkan suku bunga acuan, maka bunga deposito dan imbal hasil surat berharga akan naik. Harapannya, masyarakat akan memilih untuk menempatkan uang di bank dibandingkan menghabiskannya untuk konsumsi yang berimbas pada kurangnya peredaran uang sehingga permintaan terhadap barang menurun. Saat permintaan barang melandai, harga akan cenderung merosot. Pada akhirnya, tingkat inflasi bisa menurun. Intervensi dengan menaikkan tingkat suku bunga akan berjalan baik untuk menurunkan inflasi inti. Namun, kondisi tersebut sedikit kurang ideal dengan tekanan inflasi di Provinsi Jambi yang banyak disumbang oleh komoditas makanan yang bersifat volatile. Kenaikan tingkat suku bunga sebesar 200 basis poin dikhawatirkan akan mendorong biaya penyediaan modal yang berpotensi untuk menurunkan tingkat investasi dan menurunkan tingkat konsumsi yang akhirnya dikhawatirkan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan penawaran di struktur perekonomian di Provinsi Jambi.

3. Inflasi

Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi m-to-m (kiri) dan y-on-y (kanan) 2021-2023



Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Inflasi di Provinsi Jambi tahun 2023 mencapai 2,99% (yoy), jauh lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang sebesar 6,35%(yoy). Namun, tingkat inflasi ini masih lebih tinggi dibanding dengan inflasi nasional 2,57% (yoy). Pergerakan tingkat inflasi tahun 2023 cukup fluktuatif. Penyesuaian subsidi BBM memicu peningkatan harga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah

tangga, beras, dan mobil yang memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi gabungan di Provinsi Jambi.

4. Nilai Tukar

Grafik 2. 4 Nilai Tukar Tahun 2023

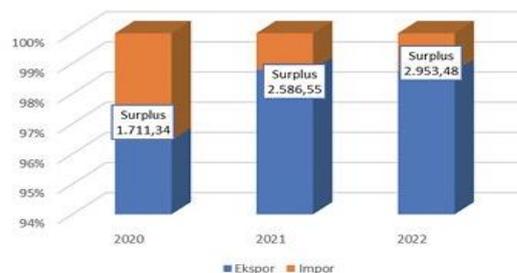


Sumber : rupiah365.com

Sumber: bi.go.id (data diolah)

Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Pada tahun 2023, rupiah mengalami pelemahan terhadap mata uang dolar dan euro. Sementara apabila dibandingkan dengan mata uang dominan di Asia, rupiah pada posisi akhir tahun sedikit menguat terhadap yen dan yuan dibanding dengan posisi awal tahun. Nilai tukar terendah untuk rupiah (IDR) berada pada nilai Rp14.170 per USD, Rp103,25 per JPY, Rp2.112,35 per CNY, Rp14.591 per EUR, Rp184,26 per Rupee, Rp10.375 per SGD, Rp3.271,1 per MYR, dan Rp11.075 per CAD. Sementara untuk nilai tukar tertinggi berada pada nilai Rp15.769 per USD, Rp127,09 per JPY, Rp2.315,61 per CNY, Rp16.767 per EUR, Rp193,74 per Rupee, Rp11.696 per SGD, Rp3.565,63 per MYR, dan Rp11.777 per CAD. Pergerakan nilai tukar rupiah tahun 2023 cenderung melemah. Fluktuasi nilai kurs rupiah tentunya berdampak pada harga komoditas ekspor dan impor. Terdepresiasi nilai tukar rupiah dari sisi harga komoditas dalam negeri relatif akan lebih murah dibandingkan dengan dengan harga barang yang sama di luar negeri yang tentunya dapat mendorong ekspor. Disisi yang lain, terdepresiasi nilai tukar rupiah dari sisi komoditas menyebabkan barang luar negeri relatif akan lebih mahal.

Grafik 2. 5 Surplus Provinsi Jambi Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Nilai ekspor Provinsi Jambi sampai dengan Oktober 2023 mencapai US\$1,808,45. Ekspor pertambangan menyumbang 58,37% dari total ekspor, diikuti sektor Industri

sebesar 37,91%, dan pertanian sebesar 3,42%. Pangsa pasar ekspor menurut negara tujuan utama adalah Singapura sebesar 37,18%, Jepang 10,92%, Cina 10,76%, India 10,61%, dan Malaysia sebesar 6,80%. Dari sisi lain nilai impor juga naik sebesar 123,27% dengan realisasi US\$66,26. Impor mesin dan alat angkutan menyumbang 42,56% dari nilai impor, diikuti hasil industri sebesar 36,98%, dan bahan kimia 18,26%. Oleh karena itu, nilai neraca perdagangan Jambi tahun 2023 berada pada kisaran surplus US\$ 1.743,19 juta. Dari kondisi tersebut, depresiasi nilai tukar rupiah berdampak positif pada nilai ekspor Jambi. Namun dari sisi impor, importasi komoditas luar negeri ke Provinsi Jambi tidak banyak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar karena sifat barang yang diimpor didominasi oleh barang pendukung produksi.

b. Indikator kinerja keuangan daerah

1. Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Tabel 2.3 Surplus/Defisit APBD Tahun 2010-2023

	TA 2021			TA 2022			TA 2023			% Growth 2022 - 2023
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
SURPLUS /DEFISIT	-1.523,10	733,57	-48,16%	-2.329,31	-53,77	2,31%	-1.758,05	-1.306,06	74,29%	-2.328,98%

Sumber : GFS, SIKD (data diolah)

Perkembangan surplus/defisit APBD dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dari data APBD tahun 2021 yang mengalami surplus sebesar Rp733,57 miliar lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi defisit sebesar Rp53,77 miliar atau turun 107,33%. Pada tahun 2023, APBD Provinsi Jambi kembali mengalami defisit pendapatan menjadi Rp1.306,06 miliar atau turun sebesar 2.328,98% dibanding tahun 2022. Pendapatan daerah merupakan sumber ekonomi yang dipungut oleh pemerintah daerah dari pasar, sementara belanja daerah merupakan suntikan pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian. Kondisi defisit pada tahun 2022-2023 memberikan sinyal bahwa porsi pendapatan daerah dalam kondisi lebih kecil dibandingkan dengan belanja. Hal ini berpengaruh positif terhadap peran kebijakan fiskal daerah dalam hal ini APBD dalam mendorong sektor perekonomian. Oleh karena itu, APBD pada tahun 2023 di Provinsi Jambi disusun ekspansif (defisit) untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian. Kondisi defisit mencerminkan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi regional yang optimal di Provinsi Jambi.

2. Pembiayaan Daerah

Tabel 2.4 Pembiayaan APBD Tahun 2021 – 2023

	TA 2021			TA 2022			TA 2023			% Growth 2022 - 2023
	PAGU	REALISASI	% REAL	PAGU	REALISASI	% REAL	PAGU	REALISASI	% REAL	
PEMBIAYAAN	1.527,52	1.429,54	93,59%	2.126,37	2.126,37	100,00%	1.737,23	1.138,67	65,55%	-46,45%

Penerimaan Pembiayaan	1.556,92	1.456,21	93,53%	2.568,01	2.352,97	91,63%	2.152,39	1.429,47	66,41%	-39,25%
Pengeluaran Pembiayaan	29,40	26,66	90,68%	235,04	226,60	96,41%	415,16	290,80	70,05%	28,33%

Sumber : GFS, SIKD (data diolah)

Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi APBD ketika terjadi defisit. Berdasarkan tren pada tiga tahun terakhir, Pembiayaan Daerah di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, Pembiayaan Daerah sempat mengalami pertumbuhan positif sebesar 48,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lalu pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 46,45%. Pada tahun 2023, Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.138,67 miliar terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.429,47 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp290,80 miliar.

Sumber penerimaan pembiayaan sebagian besar masih mengambil dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Begitu pula dengan tahun 2023 dengan realisasi Penggunaan SiLPA sebesar Rp1.265,84 miliar atau 88,55% dari total Penerimaan Pembiayaan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun ini didominasi dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp252,80 miliar atau 86,93% dari total Pengeluaran Pembiayaan. Pola ini hampir sama disetiap tahun dan mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah memang menjadikan SiLPA sebagai cadangan pembiayaan untuk menghadapi defisit di tahun berikutnya. Sementara investasi masih diperuntukkan sebagai tambahan modal bagi BUMD yang ada seperti Bank Jambi dan PDAM.

c. Prospek kegiatan ekonomi unggulan

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional. Arah pembangunan ekonomi mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Pembangunan adalah suatu perubahan yang positif, yang meliputi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya di suatu daerah yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya, dan akan tercermin dari pendapatan daerah dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur seberapa besar kinerja perekonomian suatu wilayah disuatu negara maka dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) total nasional. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) sektor-sektor ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.

Pengertian ekonomi basis di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja suatu sektor merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab- sebab kemajuan sektor basis adalah: (1) perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, (2) perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah, (3) perkembangan teknologi, dan (4) adanya pengembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah: (1) adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan (2) kehabisan cadangan sumber daya.

Sedangkan sektor potensial yang ada di suatu daerah merupakan sektor yang memiliki kemampuan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan sektor yang sama di daerah lain. Dengan demikian produk dan jasa dari sektor ekonomi potensial tersebut di samping dapat mencukupi kebutuhan sendiri juga dapat dijual ke luar sehingga daerah memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut akan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dan menggerakkan sektor potensial yang sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya sektor ekonomi yang tidak potensial, sehingga perekonomian secara keseluruhan akan berkembang yang pada akhirnya masing-masing sektor ekonomi merupakan pasar bagi sektor lain. Kondisi tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Untuk menganalisis sektor unggulan dan sektor potensial yang ada di Provinsi Jambi pada bab ini menggunakan:

1) Analisis Location Quotient (LQ)

Hasil Analisa ini berguna untuk mengidentifikasi basis ekonomi (sektor basis) suatu wilayah. Dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan (leading sector) di suatu wilayah, dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan ekonomi sejenis pada lingkup yang lebih luas (regional atau nasional).

Hasil perhitungan LQ menggunakan komparasi variabel PDRB Provinsi Jambi dengan PDB Nasional tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan empat sektor yang tetap menjadi sektor basis dengan nilai $LQ > 1$. Empat sektor yang tetap menjadi sektor basis di tahun 2023 ini merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif, berperan sebagai penopang struktur perekonomian di Jambi dan menjadi kunci pemulihan ekonomi setelah era pandemi Covid-19.

Tabel 2.5 Hasil Analisis Location Quotient – Sektor Basis Provinsi Jambi Tahun 2022

Sektor Lapangan Usaha	2018	LQ > 1	2023	LQ >1
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,03	Basis	2,09	Basis
2. Pertambangan dan Penggalian	3,00	Basis	3,11	Basis
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,59	Basis	1,49	Basis
4. Jasa Pendidikan	1,02	Basis	1,04	Basis

Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

2) Analisis Shift-Share

Untuk mengetahui keunggulan kompetitif suatu sektor baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan sektor lain dalam suatu daerah maupun dalam wilayah yang lebih luas digunakan analisis *Shift-Share*. Terdapat tiga komponen dengan informasi dasar yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

- Komponen *Regional Share*, perbandingan pertumbuhan ekonomi dari wilayah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Komponen *Propotional Share (PS)*, perubahan kinerja sektor di wilayah provinsi terhadap sektor yang sama di tingkat nasional;
- Komponen *Differential Share (DS)*, untuk menentukan seberapa jauh kemampuan daya saing sektor di wilayah provinsi dengan perekonomian secara nasional. Komponen ini juga disebut komponen keunggulan kompetitif.

Analisis *Shift-Share* dapat menggambarkan kinerja masing-masing sektor pada PDRB Provinsi Jambi dibandingkan dengan PDB level nasional dengan 2018 sebagai tahun awal dan 2022 sebagai tahun akhir. Komponen yang dianalisis difokuskan pada komponen *Differential Share (DS)*, hasil perhitungan menunjukkan terdapat sepuluh sektor dengan nilai DS positif dan tujuh sektor nilai DS negatif.

Sektor dengan nilai DS positif menunjukkan kemampuan sektor untuk bersaing dengan sektor yang sama di provinsi lain maupun secara nasional. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan sektor ini untuk terus maju dan meningkatkan produktivitasnya. Kebijakan pemerintah yang tepat serta kolaborasi yang efektif dengan pengelola sumber daya sektor ini akan meningkatkan kinerja daya saing dan perkembangan sektor kompetitif ini.

Tabel 2.6 Hasil Analisis Shift-Share Komponen Differential Share (DS) Provinsi Jambi
Tahun 2023

Sektor Lapangan Usaha	Nilai DS > 0
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;	4,087
2. Pertambangan dan Penggalian;	4,816
3. Pengadaan Listrik dan Gas;	18,008
4. Konstruksi;	8,064
5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;	2,698
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;	3,555
7. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,091
8. Jasa Perusahaan	3,722
9. Real Estate;	1,790
10. Jasa Pendidikan.	3,387

Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

3) Analisis Klassen Typology

Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif hasil analisis LQ dan DS kemudian diklasifikasikan menggunakan analisis *Typologi Klassen*. Analisis ini digunakan untuk memperoleh klasifikasi posisi pertumbuhan sektor sektor ekonomi wilayah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan sektor keunggulan komparatif melalui nilai LQ dan keunggulan kompetitif melalui nilai DS.

Analisis *Typologi Klassen* dilakukan dengan mengklasifikasikan setiap sektor ekonomi ke dalam empat kuadran dengan kriteria:

1. Sektor maju dan tumbuh cepat, pada kuadran I dengan nilai LQ > 1 dan nilai DS > 0;
2. Sektor potensial atau masih dapat berkembang, pada kuadran II dengan nilai LQ < 1 dan nilai DS > 0;
3. Sektor maju tapi tertekan (stagnan), pada kuadran III dengan nilai LQ > 1 dan nilai DS < 0;
4. Sektor relatif tertinggal, pada kuadran IV dengan nilai LQ < 1 dan nilai DS < 0.

Tabel 2.7 Hasil Analisis Typologi Klassen - Provinsi Jambi Tahun 2023

Location Quotient	Differential Share	
	Negatif (-)	Positif (+)
LQ > 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; ▪ Pertambangan dan Penggalian; ▪ Jasa Pendidikan.
	<i>Kuadran-III</i>	<i>Kuadran-I</i>
LQ < 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan; ▪ Transportasi dan Pergudangan; ▪ Informasi dan Komunikasi; ▪ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; ▪ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; ▪ Jasa lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Listrik dan Gas; ▪ Konstruksi; ▪ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; ▪ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; ▪ Jasa Keuangan dan Asuransi; ▪ Real Estate; ▪ Jasa Perusahaan
	<i>Kuadran-IV</i>	<i>Kuadran-II</i>

Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

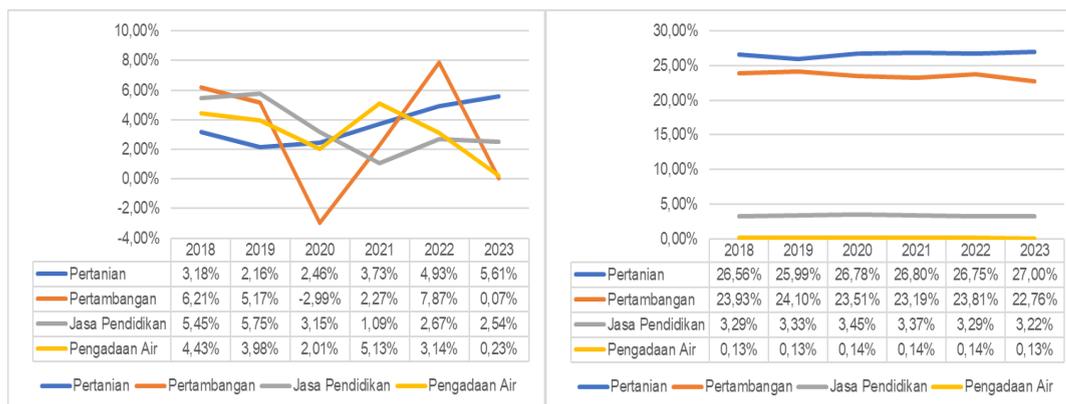
c.1. Sektor Unggulan Daerah

Kriteria sektor ekonomi unggulan yaitu dapat menunjang serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan perannya atas: (1) tingkat kemampuan sektor dalam memberi kontribusi terhadap penerimaan PDRB daerah, (2) tingkat kemampuan menyerap tenaga kerja, (3) potensi dalam menghasilkan komoditas ekspor dan (4) tingkat keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dan kriteria diatas, Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor Pertambangan & Penggalian serta Sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor ekonomi unggulan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ketiga sektor ini dapat maju dan tumbuh pesat dibandingkan dengan nasional. Penjelasan pada bagian selanjutnya akan lebih di fokuskan pada tiga sektor tersebut. Sementara sektor unggulan lain yaitu Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang merupakan sektor maju namun laju tumbuhnya belum setinggi pertumbuhan sektor yang sama secara nasional. Profil sektor-sektor unggulan tersebut akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan selanjutnya.

Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan (kiri) dan Kontribusi (kanan) Sektor Unggulan Provinsi

Jambi 2023



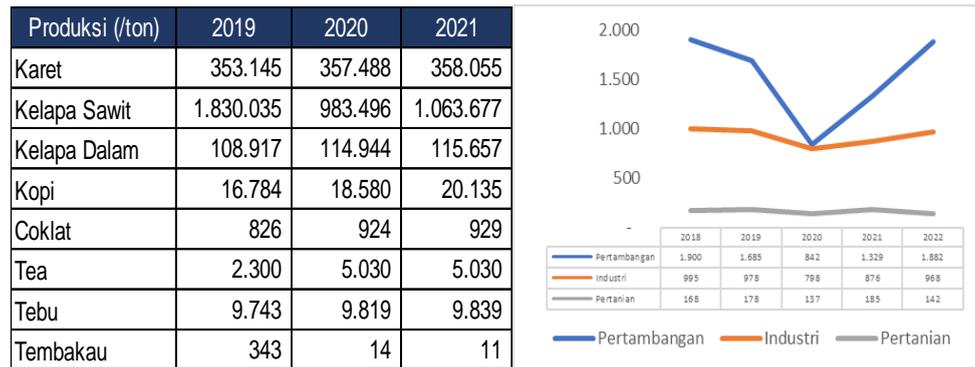
Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Dalam kurun waktu 2018-2023 kontribusi empat sektor unggulan di Provinsi Jambi atas pertumbuhan PDRB cukup stabil, dengan sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Jambi. Di awal pandemi covid-19 pada tahun 2020, ke empat sektor unggulan mengalami laju pertumbuhan negatif, bahkan sektor pertambangan mengalami laju pertumbuhan -2,99%. Namun demikian pada tahun 2021 seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional-daerah serta ditopang oleh kenaikan harga komoditas dan energi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan, dan sektor jasa pendidikan mengalami *rebound* pertumbuhan yang cukup signifikan dan berkelanjutan hingga tahun 2023.

a) Profil Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan masih merupakan sektor ekonomi unggulan secara terus menerus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian di Provinsi Jambi. Sektor pertanian, kehutanan & perikanan merupakan sektor unggulan penopang perekonomian di sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Jambi. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo dan Bungo, dengan komoditas unggulan karet, kelapa sawit, kopi, coklat, pinang, teh, dan tebu.

Gambar 2. 1 Jumlah Produksi (Ton) dan Nilai Ekspor Komoditi (Juta US\$) Provinsi Jambi



Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor utama pada perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur dengan hasil produk minyak dan gas bumi. Peran produk minyak dan gas bumi paling dominan di struktur ekspor produk unggulan di Jambi, dimana produk pertambangan menyumbang 62,90%, produk pertanian 4,75% dan produk industri 32,35% dari dari total ekspor selama tahun 2022.

Produksi produk perkebunan masih berfluktuatif tiap tahun dan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan dan peremajaan tanaman telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.

Pada sektor pengadaan air, peran pembangunan PLTA Batang Merangin yang dilakukan oleh pihak swasta secara *multiyears* tahun 2020-2025 dan proyek pengadaan sarana air bersih minum di Kota Jambi, berperan cukup besar yang menjadikan sektor ini menjadi sektor basis ekonomi dengan daya serap tenaga kerja serta nilai investasi yang ditanamkan. Sementara untuk sektor jasa pendidikan ditandai dengan mulai pulihnya aktivitas usaha bimbingan belajar, serta pertumbuhan sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan baik negeri atau swasta di Provinsi Jambi.

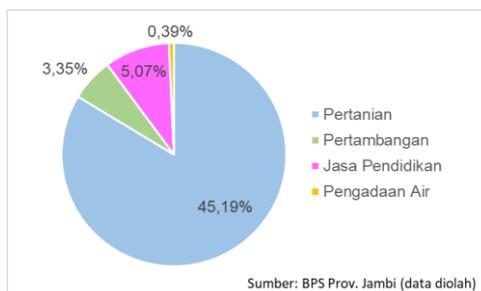
b) Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Selain memberikan kontribusi atas pembentukan PDRB, kriteria lain dari sektor unggulan adalah kemampuannya dalam menyerap sumberdaya tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2023 lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 814 ribu orang atau 45,19% dari jumlah penduduk bekerja sebanyak 1,8 juta orang di Provinsi Jambi. Dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian dan tumbuhnya sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan diharapkan serapan tenaga kerja dapat mulai tumbuh kembali.

Permasalahan berulang dari sisi tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan antara lain adalah tingkat kesempatan kerja yang berkurang karena lahan pertanian yang semakin sedikit, upah yang minim, daya tawar hasil produksi rendah. Dari sisi usia rata-rata petani saat ini berusia lanjut dan berpendidikan rendah. Selain itu, pengolahan pertanian masih dilakukan secara tradisional ditambah kondisi pengairan yang kurang mendukung.

Grafik 2.8 Distribusi Tenaga Kerja Pada Sektor Unggulan



Dengan permasalahan tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun menyerap tenaga kerja yang besar dan berkontribusi besar pada PDRB belum mampu secara optimal meningkatkan kesejahteraan petani.

Perhatian khusus dari pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani ke depan disamping mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Tabel 2.8 Penduduk Bekerja Per Kabupaten/Kota di Sektor Pertanian

Wilayah	Pertanian		
	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	768716	807654	801702
Kerinci	75854	86134	83452
Merangin	102281	99148	101353
Sarolangun	65019	63943	62016
Batanghari	55163	65206	69387
Muaro Jambi	88485	94987	96094
Tanjung Jabung Timur	80040	85310	80307
Tanjung Jabung Barat	102844	114155	110031
Tebo	105215	105734	104447
Bungo	75955	72327	73563
Kota Jambi	10326	11282	11819
Kota Sungai Penuh	7534	9428	9233

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pada sektor pertambangan distribusi tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini pada tahun 2023 adalah sebesar 3,35% atau sebanyak 60.300 orang. Efisiensi pekerja oleh pelaku usaha pada sektor ini akibat dampak pandemi tahun 2020 menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja. Prospek perekonomian dunia yang positif khususnya aktivitas negara

mitra dagang migas, diharapkan mampu menumbuhkan kembali serapan tenaga kerja pada sektor ini.

Tabel 2.9 Penduduk Bekerja per Kabupaten/Kota di Sektor Pertambangan

Wilayah	Pertambangan		
	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	49302	70525	64211
Kerinci	1279	1115	1176
Merangin	13526	19913	18087
Sarolangun	12466	15025	15141
Batanghari	4490	3624	3698
Muaro Jambi	2366	661	2740
Tanjung Jabung Timur	173	216	0
Tanjung Jabung Barat	476	1350	649
Tebo	2177	1671	2709
Bungo	76	75	270
Kota Jambi	5447	12443	9286
Kota Sungai Penuh	6826	14432	10455

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Serapan tenaga kerja terbesar pada sektor tambang batubara berada di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Sementara pada sektor pertambangan migas yang antara lain di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat, jumlah tenaga kerja yang diserap tidak sebesar kebutuhan tenaga kerja

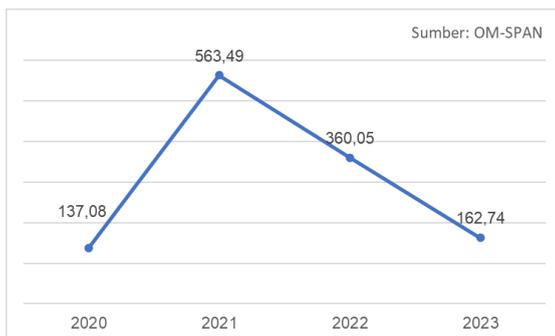
pada sektor batubara. Tambang migas merupakan pekerjaan yang sarat dengan teknologi tinggi, sehingga tenaga kerja lokal sulit untuk bersaing. Kesenjangan kemampuan tenaga kerja pada sektor unggulan ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tingkat pendidikan angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah tamat SD kebawah, namun kondisi ini terus membaik sehingga terjadi penurunan secara signifikan jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah diiringi peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi. Perbaikan kondisi ini harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan produktifitas angkatan kerja. Untuk mendorong tingkat produktifitas, maka angkatan kerja akan diarahkan kepada pendidikan vokasi, sehingga angkatan kerja yang tamat SMA/SMK akan memiliki keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian diharapkan tenaga kerja tersebut akan mampu bersaing tidak hanya di Provinsi Jambi, akan tetapi dalam wilayah yang lebih besar termasuk dalam memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

c) Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor unggulan di Provinsi Jambi tahun 2023 yang terbesar yaitu dari sektor pertambangan sebesar Rp1.046,37 miliar, sementara dari sektor pertanian sebesar Rp813,27 miliar, sektor pengadaan air Rp2,11 miliar dan jasa Pendidikan sebesar Rp4,03 miliar. Sesuai dengan potensi pajak berdasarkan *tax ratio national*, kontribusi perpajakan pada sektor-sektor ini masih bisa untuk dioptimalkan.

Grafik 2.9 Bea Keluar/Pungutan Ekspor (dalam miliar rupiah)



Mulai pulihnya perekonomian dunia khususnya pada negara mitra dagang tujuan ekspor hasil komoditas sektor unggulan dari Provinsi Jambi menambah kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah. Mesekupin

begitu, pendapatan yang berasal dari bea keluar/pungutan ekspor cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021, tercatat sebesar Rp162,74 miliar di periode akhir tahun 2023. Penerimaan Bea Keluar tahun 2023 didominasi oleh komoditi cangkang sawit sebesar Rp67,26 miliar dan CPO sebesar Rp56,18M. Penerimaan Bea Keluar tahun 2023 dipengaruhi pengembalian (restitusi) kelebihan pembayaran karena salah tarif dengan nilai pengembalian Rp2,42 miliar dan hasil keputusan Pengadilan Pajak sebesar Rp1,80 miliar.

d) Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Strategi Provinsi Jambi untuk memajukan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu: (1) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan; (2) Pemantapan dan Pengembangan Jalan ke Kawasan dan Jalan Produksi; (3) Pemantapan Irigasi dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Ketiga strategi tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi, DAK Fisik dan Dana Desa, serta dukungan pembiayaan melalui KUR.

DAK Fisik Bidang Pertanian di Provinsi Jambi terdiri dari 11 (sebelas) output (RO) yang terbagi menjadi 3 (tiga) RO non PN dan 8 (delapan) RO PN. Pada tahun 2023, mayoritas anggaran output di Bidang Pertanian telah terealisasi di atas 98% kecuali output Pelayanan Publik Lainnya [PN] yang memiliki realisasi sebesar 87,98%. Terdapat 3 (tiga) output yang telah mencapai capaian realisasi anggaran sebesar 100% yaitu Koordinasi, Data dan Informasi Publik, dan Sertifikasi Produk [PN]. Sementara itu, berdasarkan capaian RO, hampir seluruh output pada Bidang Pertanian telah memiliki capaian RO mencapai 100%, kecuali output Pelayanan Publik Lainnya [PN] dengan realisasi sebesar 61,23% dan Sarana Pengembangan Kawasan [PN] satuan hektar yang terealisasi sebesar 99,71%. Data capaian di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran maupun RO DAK Fisik bidang Pertanian di Provinsi Jambi tahun 2023 memiliki kinerja yang memuaskan.

DAK Fisik Bidang Pendidikan di Provinsi Jambi terdiri dari 5 (lima) output (RO).

RO tersebut terbagi menjadi 1 (satu) RO non PN dan 4 (empat) RO PN. Pada tahun anggaran 2023, seluruh anggaran output di Bidang Pendidikan telah terealisasi di atas 94%. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada output Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah [PN] dengan realisasi mencapai 99,93%, kemudian disusul oleh Pelatihan Bidang Pendidikan [PN] yang terealisasi sebesar 97,28%. Meskipun capaian realisasi anggaran pada Bidang Pendidikan belum ada yang mencapai 100%, namun berdasarkan capaian RO, seluruh output pada bidang Pendidikan telah memiliki capaian RO mencapai 100%. Bahkan, mayoritas capaian RO di bidang ini memiliki capaian realisasi RO di atas 100% yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [PN] dengan realisasi sebesar 103,42%, Pelatihan Bidang Pendidikan [PN] dengan realisasi sebesar 137,63%, serta Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [PN] dengan realisasi mencapai angka 147,56%. Data capaian di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran maupun RO DAK Fisik Bidang Pendidikan di Provinsi Jambi tahun 2023 memiliki kinerja yang memuaskan.

e) *Tantangan Fiskal Pada Sektor Unggulan Daerah*

Salah satu tantangan fiskal pemerintah di Provinsi Jambi adalah dinamika harga komoditas sektor pertanian yang turut andil atas fluktuasi laju inflasi. Komoditas sektor pertanian tersebut antara lain bawang merah, cabai merah, cabai rawit serta beras. Meskipun menjadi sektor basis, namun terdapat beberapa komoditas pangan yang memiliki ketergantungan pasokan dari daerah lain. Selain itu, produk komoditas unggulan ekspor Jambi masih dalam bentuk bahan mentah, dengan tingkat harga yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dunia, yaitu produk karet dan kelapa sawit.

Dari sisi pendapatan perpajakan, berdasar analisa *tax ratio* nasional terhadap PDRB terdapat potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan. Beberapa faktor yang berpengaruh antara lain banyaknya usaha yang memiliki kegiatan ekonomi di Jambi namun NPWP tidak terdaftar di Jambi atau hanya terdaftar sebagai NPWP Cabang yang tidak memiliki kewajiban pembayaran pajak seutuhnya. Selain itu, adanya persoalan data perkebunan sawit, yang ternyata bervariasi antara satu instansi dan instansi lain di pemerintahan.

Pada sektor pertambangan, eksplorasi bahan tambang dan galian yang dilakukan di Provinsi Jambi belum berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi eksplorasi. Penerapan *good mining practise* belum banyak dilakukan oleh operator tambang, eksplorasi SDA masih berorientasi profit tanpa pertimbangan aspek sosial dan lingkungan, disisi lain potensi PAD dari sektor ini cukup besar.

f) *Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan*

Alokasi anggaran pemerintah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan saat ini masih berfokus pada sektor produksi. Sementara kebutuhan pada sektor ini adalah penciptaan atau kepastian pasar, kepastian harga serta perbaikan tata niaga bisnis dan dukungan kelembagaan. Faktor-faktor ini akan lebih memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan petani dan mendukung pengembangan sektor pertanian kedepan. Kebijakan tersebut antara lain. (1) Kepastian harga produk pertanian dengan pemanfaatan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG); (2) Akselerasi belanja sektor pertanian berbasis data inflasi, ketersediaan stok pangan, harga komoditi global; dan (3) Pengembangan produksi bahan substitusi komoditi pangan, contoh: bubuk cabai dan bubuk bawang.

Gambar 2.2 Sektor Potensial dan Sektor Unggulan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi

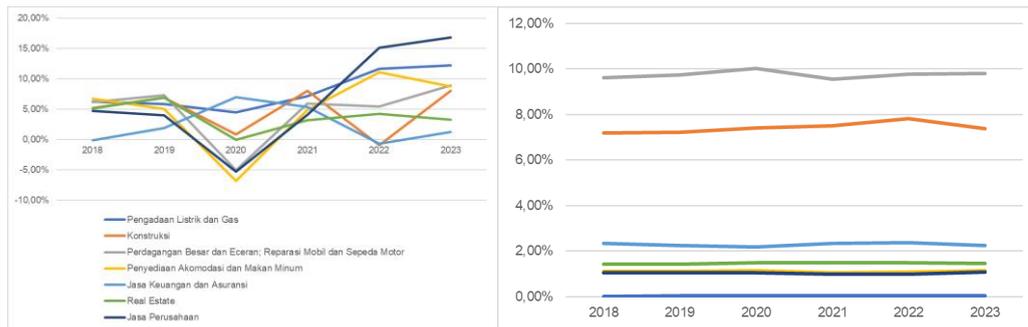


c.2. Sektor Potensial Daerah

Berdasarkan hasil analisis LQ dan DS, dapat diklasifikasikan sektor potensial daerah. Sektor ini berada pada kuadran II hasil analisis *Typologi Klassen* dengan kriteria sektor potensial atau masih dapat berkembang. Sektor potensial di Provinsi Jambi berdasarkan analisis tersebut yaitu: (1) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; (2) Sektor Konstruksi; (3) Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor; (4) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (5) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; (6) Sektor *Real Estate*; serta (7) Sektor Jasa Perusahaan.

Grafik 2.10 Laju Pertumbuhan (kiri) dan Kontribusi (kanan) Sektor Potensial

Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pada grafik sebelah kanan di atas terlihat kontribusi terhadap pada PDRB Jambi selama periode tahun 2018 sampai dengan 2023 kelima sektor potensial tersebut cenderung stabil. Meskipun laju pertumbuhannya sempat mengalami penurunan, namun lima sektor tersebut mampu bertahan dan tumbuh kembali setelah masa pandemi covid-19 seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Pada bagian selanjutnya, analisis akan lebih difokuskan pada dua sektor potensial yang memiliki kontribusi tinggi terhadap PDRB yaitu sektor perdagangan dan konstruksi.

a) Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

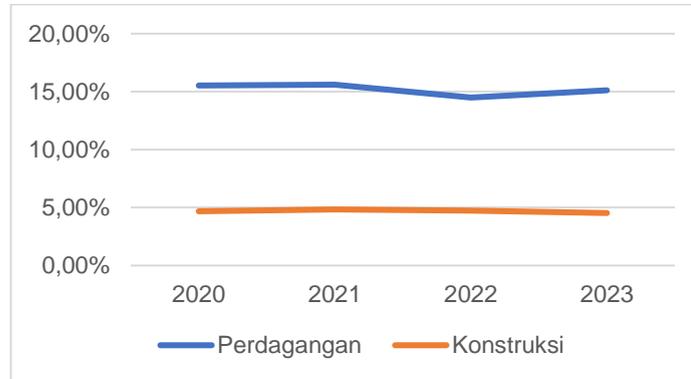
Kinerja Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 tumbuh 8,87% dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 10,20%. Termasuk kedalam tiga besar kontribusi perekonomian di Jambi setelah sektor primer pertanian dan pertambangan. Pertumbuhan kinerja sektor perdagangan disebabkan membaiknya aktivitas masyarakat seiring pelonggaran pembatasan sosial dan program vaksinasi di Provinsi Jambi. Program pemerintah melalui penyaluran berbagai Bantuan Langsung Tunai cukup berhasil menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Sementara dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian dan fasilitas sarana prasarana wilayah yang dimiliki, sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin.

Laju pertumbuhan pada Sektor Konstruksi menurun di tahun 2022 sebesar 5,41% kemudian tumbuh positif di periode 2023 yaitu sebesar 8,87% dan memiliki kontribusi yang cukup signifikan di angka 10,20% pada perekonomian di Jambi. Karakter sektor konstruksi di Jambi masih dipengaruhi oleh faktor belanja modal pemerintah pusat dan daerah. Alokasi belanja modal di tahun 2023 menurun dibandingkan dengan alokasi tahun 2022, sehingga hal ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan sektor konstruksi. Kondisi ini selaras

dengan kebijakan pemerintah di tahun 2023 yang difokuskan untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan BLT.

b) *Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan*

Grafik 2.11 Tenaga Kerja Sektor Potensial Provinsi Jambi

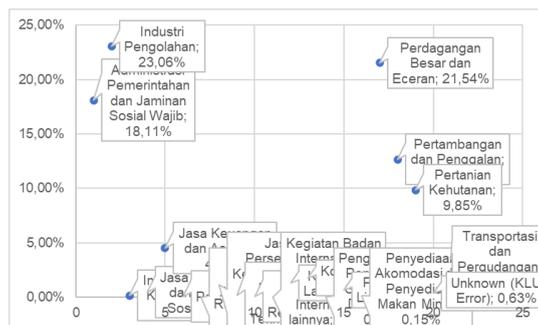


Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Serapan tenaga kerja pada sektor perdagangan pada tahun 2023 sebanyak 272 ribu orang, 15,11% dari jumlah 1,8 juta angkatan kerja di Provinsi Jambi. Terdapat peningkatan pekerja dari sektor usaha sebanyak 11 ribu orang dibandingkan tahun 2022. Pada sektor konstruksi, serapan tenaga kerja tahun 2023 sebanyak 81 ribu orang, mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode tahun lalu.

c) *Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah*

Grafik 2.12 Penerimaan Pajak Provinsi Jambi Tahun 2023



Secara umum pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3,3 triliun, komponen terbesar adalah pajak daerah. Namun di sisi lain, realisasi retribusi daerah belum optimal dengan capaian 61,89%

dari target Rp151 miliar. Indikasi penyebab rendahnya capaian retribusi daerah adalah kurang optimalnya *collecting agency*, serta penetapan target yang terlalu tinggi. Apabila dilihat dari sisi penerimaan perpajakan, Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor penyumbang pajak terbesar kedua dari struktur penerimaan pajak per lapangan usaha tahun 2023 di Provinsi Jambi sebesar Rp1,78 triliun. Sementara penerimaan pajak dari sektor Konstruksi adalah sebesar Rp143 miliar. Berdasar analisa tax ratio nasional terhadap PDRB, atas penerimaan

perpajakan pada sektor ini terdapat potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan.

d) Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Dukungan APBN untuk mengembangkan sektor konstruksi dan perdagangan di Jambi diwujudkan pada realisasi belanja barang dan belanja modal yang cukup besar melalui belanja satker K/L. Belanja di Kementerian Perdagangan pada Tahun 2023 mencapai 9,80 miliar dengan pertumbuhan selama 3 tahun terakhir sebesar 140,16%.

e) Tantangan Fiskal Pada Sektor Potensial Daerah

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan diluar pajak, antara lain melalui peningkatan pembiayaan pada BPD, optimalisasi kontribusi BUMD dan pemanfaatan aset daerah. Namun demikian, untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yaitu identifikasi terhadap potensi sumber pendapatan dan perluasan basis pajak, perbaikan administrasi pajak/retribusi melalui pemanfaatan TI untuk mendukung sistem yang terintegrasi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, perbaikan layanan, kepatuhan atas peraturan serta perbaikan peraturan pajak/retribusi. Dengan demikian, basis pendapatan utama daerah dapat terus tumbuh serta berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

f) Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk menggeser struktur perekonomian Provinsi Jambi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder. Sampai dengan tahun 2023, *share* perekonomian Provinsi Jambi masih di dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan. Beberapa sektor sekunder dan tersier telah menjadi sektor potensial yaitu sektor perdagangan (tersier) dan sektor konstruksi (sekunder). Namun, terdapat fenomena yang perlu mendapatkan perhatian dimana dalam kurun waktu tahun 2015-2023 kontribusi industri pengolahan (sekunder) terhadap PDRB Provinsi Jambi terus memperlihatkan tren penurunan setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan belum memperlihatkan kinerja yang baik dalam lima tahun ini. Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pemberian intensif kepada investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta mengoptimalkan penggunaan sarana jalan dan pelabuhan yang ada. Dukungan kebijakan untuk percepatan perwujudan kawasan industri Kualatungkal, Ujung

Jabung serta Muara Sabak harus terus dilakukan untuk mendorong sektor ini lebih berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jambi dan memberikan nilai tambah yang dapat mewujudkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap perekonomian Provinsi Jambi.

d. Analisis kemandirian fiskal daerah

Tingkat Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa bergantung bantuan dari luar termasuk Pemerintah pusat. Tingkat Kemandirian Fiskal dapat diukur menggunakan Formula Hunter (1977) yang disesuaikan dengan struktur APBD di Indonesia. Untuk mengukur indeks tersebut menggunakan formula sebagai berikut:

$$IKF = 1 - \frac{Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REV_{SH}}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REV_{SH}} \text{ dimana}$$

REV_{OR} adalah PAD

Tr_{GP} adalah DAU, Otsus, Dana Desa dan Transfer Antar Daerah

Tr_{SP} adalah DAK Fisik dan DAK Non Fisik

B adalah Penerimaan Pinjaman Daerah

REV_{SH} adalah DBH

Hasil dari perhitungan IKF kemudian akan dikategorikan. Klasifikasi atas hasil IKF menggunakan Kategori sebagai berikut:

Tabel 2.10 Tabel Tingkat Kemandirian Fiskal

Nilai IKF	Kategori
≥ 0,75	Sangat Mandiri
0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
< 0,25	Belum Mandiri

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, maka diperoleh perhitungan IKF sebagai berikut:

Tabel 2.11 Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
REV _{OR}	3.276,62	3.533,46	3.244,51
PAD	3.276,62	3.533,46	3.244,51
TR _{GP}	8.883,06	9.581,69	8.983,38
DAU	7.402,17	7.404,53	7.672,33
DID	261,84	132,49	123,59
DD	1.219,05	1.119,65	1.187,46
Transfer Antar Daerah	0,00	925,02	0,00
TR _{SP}	3.097,94	2.781,70	3.035,36
DAK Fisik	1.113,88	992,76	1.087,39

DAK Non Fisik	1.984,06	1.788,94	1.947,97
B	203,89	144,94	163,63
REVSH	2.276,75	3.154,24	3.175,98
DBH	2.276,75	3.154,24	3.175,98
IKF	0,18	0,18	0,17
Kategori	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri

Jika kita amati perkembangannya dalam 3 tahun terakhir, terlihat bahwa tingkat kemandirian daerah di Provinsi Jambi tidak banyak berubah. Konsistensi dalam kategori belum mandiri ini semakin menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat masih sangat tinggi. Tingkat IKF tahun 2023 memiliki rata-rata sebesar 17% yang juga berarti bahwa PAD hanya cukup untuk membiayai 17% dari keseluruhan Belanja Daerah, sementara sisanya masih harus bergantung pada dana dari pusat. Hasil ini semakin meyakini bahwa potensi PAD, baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah masih belum optimal dikelola oleh pemerintah daerah. Permasalahan utamanya adalah Pemerintah Daerah yang belum memiliki data pasti potensi yang ada sehingga dalam perumusan target capaian masih dibawah/diatas potensi. Pada sisi lain, indikator capaian antara target dan realisasi selalu menjadi ukuran kinerja kepala OPD terkait. Oleh sebab itu, penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar setiap rupiah dana yang ditransfer dari pusat dapat dimanfaatkan dengan baik dan digunakan sesuai peruntukan yang tepat sesuai target dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah.

Peningkatan tingkat kemandirian fiskal daerah tentunya harus diikuti dengan perbaikan di berbagai lini. Selain memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya sangat penting untuk membangun reputasi yang baik di masyarakat. Perbaikan yang dilakukan tidak hanya dari sisi pertanggungjawaban keuangan, namun juga diwujudkan dalam bentuk hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing. Apalagi berdasarkan hasil audit tahun 2021 yang lalu seluruh Pemda mendapatkan predikat WTP. Prestasi yang baik tersebut hendaknya juga diikuti dengan perbaikan bukan hanya dari sisi pertanggungjawaban keuangan tapi juga diwujudkan dalam bentuk hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.

e. Analisis peranan pusat di daerah

Apabila dilihat dari alokasi APBN di Provinsi Jambi dan tingkat kemandirian, peranan pusat di daerah masih sangat tinggi. Alokasi pagu dana transfer masih mendominasi

dari total pendapatan daerah. Hal ini kembali menandakan bahwa Provinsi Jambi masih sangat bergantung dengan Pemerintah Pusat.

III. Analisis Kondisi Keuangan Regional

a. Penjelasan singkat APBD masing-masing Pemerintah Daerah

Tabel 3. 1 I-Account APBD Tahun 2021-2023 (dalam Miliar Rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2021			TA 2022			TA 2023			% Growth 2022 - 2023
	PAGU	REALISASI	% REAL	PAGU	REALISASI	% REAL	PAGU	REALISASI	% REAL	
PENDAPATAN DAERAH	18.009,95	17.959,86	99,72%	18.118,01	18.685,20	103,13%	19.258,85	16.440,01	85,36%	-12,02%
Pendapatan Asli Daerah	3.060,29	3.276,62	107,07%	3.505,98	3.533,46	100,78%	3.858,47	3.244,51	84,09%	-8,18%
Pendapatan Transfer	14.399,59	14.180,12	98,48%	14.471,58	15.068,53	104,12%	15.329,11	13.129,47	85,65%	-12,87%
Lain-lain Pendapatan Daerah	550,07	503,13	91,47%	140,45	83,21	59,25%	71,27	66,03	92,65%	-20,65%
BELANJA DAERAH	19.533,05	17.226,29	88,19%	20.447,32	17.829,75	87,20%	21.016,90	17.746,07	84,44%	-0,47%
Belanja Operasi	12.970,57	11.873,85	91,54%	13.175,55	12.137,26	92,12%	13.081,68	11.742,65	89,76%	-3,25%
Belanja Pegawai	7.023,68	6.618,49	94,23%	7.082,64	6.603,00	93,23%	7.034,94	6.339,99	90,12%	-3,98%
Belanja Barang	4.719,72	4.128,07	87,46%	5.495,39	5.004,10	91,06%	5.440,38	4.794,76	88,13%	-4,18%
Belanja Bunga	21,14	7,76	36,71%	15,36	14,33	93,29%	17,71	19,02	107,40%	32,73%
Belanja Subsidi	13,81	13,81	100,00%	23,10	14,14	61,21%	20,34	21,90	107,67%	54,88%
Belanja Hibah	1.107,91	1.056,07	95,32%	506,90	467,09	92,15%	548,96	551,75	100,51%	18,12%
Belanja Bantuan Sosial	84,31	49,66	58,90%	52,16	34,60	66,33%	19,33	15,22	78,74%	-56,01%
Belanja Modal	3.458,61	3.186,30	92,13%	4.113,59	3.622,76	88,07%	4.634,31	4.059,98	87,61%	12,07%
Belanja Modal	3.458,61	3.186,30	92,13%	4.113,59	3.622,76	88,07%	4.634,31	4.059,98	87,61%	12,07%
Belanja Tidak Terduga	203,97	90,29	44,27%	205,44	38,17	18,58%	129,10	10,31	7,99%	-72,99%
Belanja Tidak Terduga	203,97	90,29	44,27%	205,44	38,17	18,58%	129,10	10,31	7,99%	-72,99%
Belanja Transfer	2.899,90	2.075,84	71,58%	2.952,76	2.031,57	68,80%	3.171,81	1.933,14	60,95%	-4,85%
SURPLUS/(DEFISIT)	-1.523,10	733,57	-48,16%	-2.329,31	-53,77	2,31%	-1.758,05	-1.306,06	74,29%	-2.328,98%
PEMBIAYAAN	1.527,52	1.429,54	93,59%	2.126,37	2.126,37	100,00%	1.737,23	1.138,67	65,55%	-46,45%
Penerimaan Pembiayaan	1.556,92	1.456,21	93,53%	2.568,01	2.352,97	91,63%	2.152,39	1.429,47	66,41%	-39,25%
Pengeluaran Pembiayaan	29,40	26,66	90,68%	235,04	226,60	96,41%	415,16	290,80	70,05%	28,33%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	4,42	2.163,11	48.939,14%	3,66	2.072,60	56.628,42%	-20,82	-167,39	803,99%	-108,08%

Sumber : GFS, SIKD, SIKRI, SIMTRADA (data diolah)

Sampai dengan akhir tahun 2023, Pendapatan Daerah mencapai Rp16.440,01 miliar atau terealisasi sebesar 85,36% dari pagu. Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 7,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data tren 3 tahun sebelumnya, realisasi Pendapatan Daerah terlihat mengalami penurunan. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.244,51 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp13.129,47 miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah (LLPDyS) sebesar

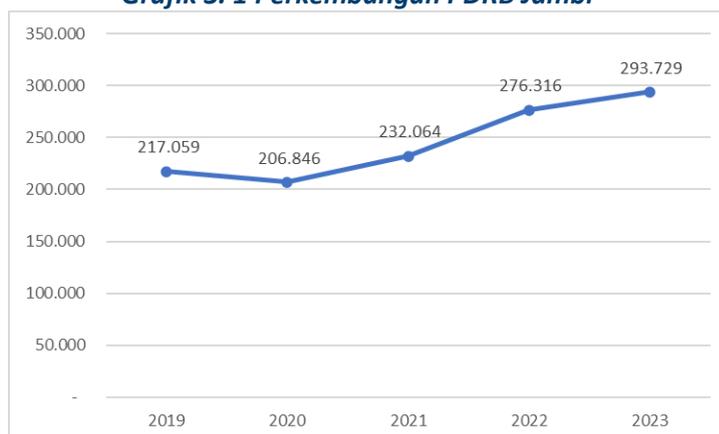
Rp66,03 miliar. Berdasarkan tren 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan komposisi Pendapatan Transfer namun terjadi penurunan pada PAD dan LLPDyS. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui Pendapatan Transfer masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Jambi.

Dari sisi belanja, pagu Belanja Daerah lingkup Provinsi Jambi tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp17.746,07 miliar atau 84,44% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp11.742,65 miliar, Belanja Modal sebesar Rp4.059,98 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp10,31 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp1.933,14 miliar. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan yang negatif sebesar 0,47% pada Belanja Operasi. Penurunan ini berdampak signifikan karena peran Belanja Operasi yang cukup besar secara porsi.

b. Perbandingan Indikator Ekonomi dan Keuangan Antar Daerah dan Pusat

1. Produk Domestik Regional Bruto

Grafik 3.1 Perkembangan PDRB Jambi

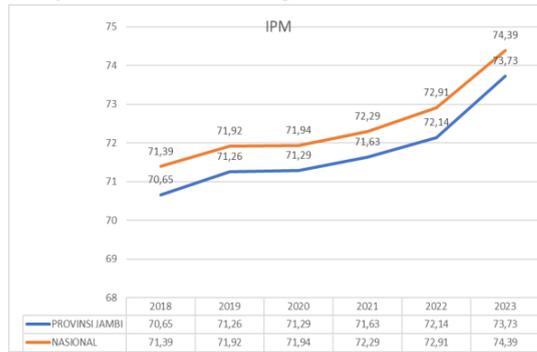


Sumber: BPS Prov. Jambi

Capaian PDRB Provinsi Jambi jika dibandingkan dengan PDB Nasional masih cukup jauh dengan tingkat kontribusi yang masih dapat dikatakan kecil. Sedangkan untuk regional Sumatera tingkat kontribusinya masih dapat dikatakan menengah dengan perbandingan yang cukup besar dari daerah lain. Dengan kata lain, peranan PDRB Provinsi Jambi dalam pembentukan PDB Nasional masih cukup kecil. Dengan mempertimbangkan potensi yang ada, maka diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan PDRB Provinsi Jambi ke depan.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Grafik 3.2 Perkembangan IPM Provinsi Jambi dan Nasional 2018 – 2023



Pada tahun 2023, IPM Provinsi Jambi mencapai 73,73 atau mengalami peningkatan 0,85% dibandingkan tahun 2022. IPM berlaku sebagai ukuran kualitas hidup karena mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah berdasarkan

sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pendekatan tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Jika kita telaah berdasarkan tiga dimensi dasar pembangunan tersebut, maka ketiga faktor sudah mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhan ini masih cukup jauh dibawah IPM Nasional yang sudah mencapai 74,39. Meskipun demikian, melihat kondisi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dapat dikatakan Provinsi Jambi sudah berada pada jalur yang tepat.

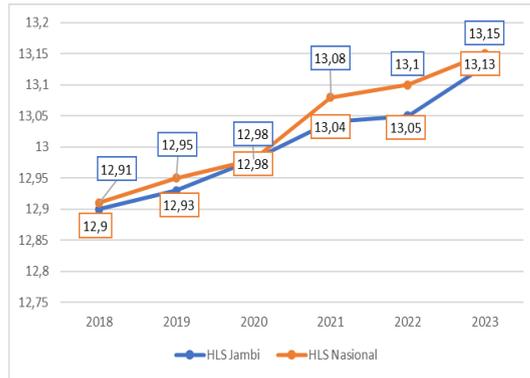
Grafik 3.3 Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jambi dan Nasional 2018-2023



Indikator pertama yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,84 tahun, lebih lama 0,23 tahun

dibandingkan dengan bayi yang lahir di tahun 2022. Peningkatan UHH ini juga dapat menjadi indikasi bahwa pelayanan dan penanganan proses kelahiran yang terus membaik serta tingkat kecukupan gizi yang juga semakin membaik dibandingkan dengan tahun lalu.

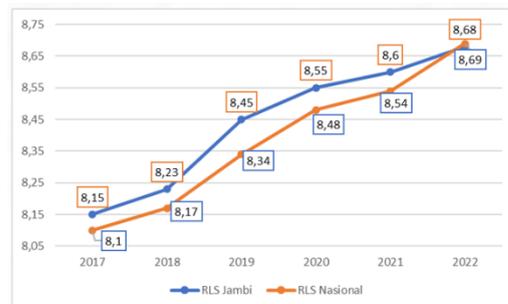
Grafik 3.4 Harapan Lama Sekolah Jambi dan Nasional Tahun 2018-2023



Indikator harapan lama sekolah juga mengalami perbaikan. Anak-anak yang pada tahun 2023 berusia 7 tahun memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13,13 tahun (Diploma 1) atau meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2022. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah

menjadi sinyal positif bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan ditempuh oleh penduduk Jambi. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi tumbuh 0,8 dari tahun lalu.

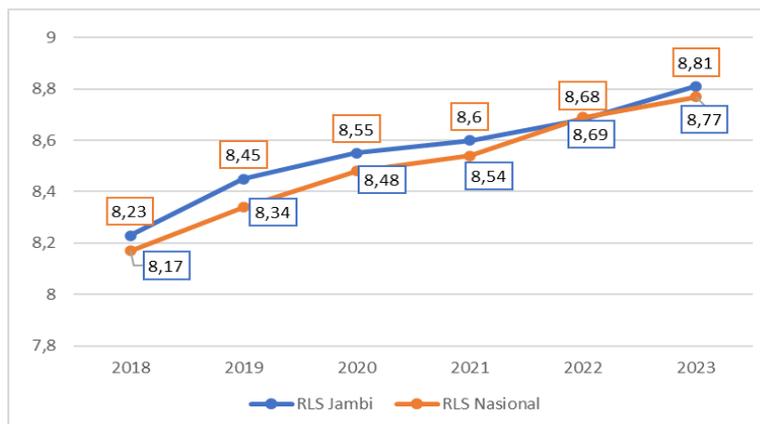
Grafik 3.5 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Jambi yang lebih baik. Pada tahun 2023, secara rata-rata penduduk Provinsi Jambi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 8,81 tahun atau hingga kelas IX (SMP kelas 3).

Grafik 3.6 Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2023



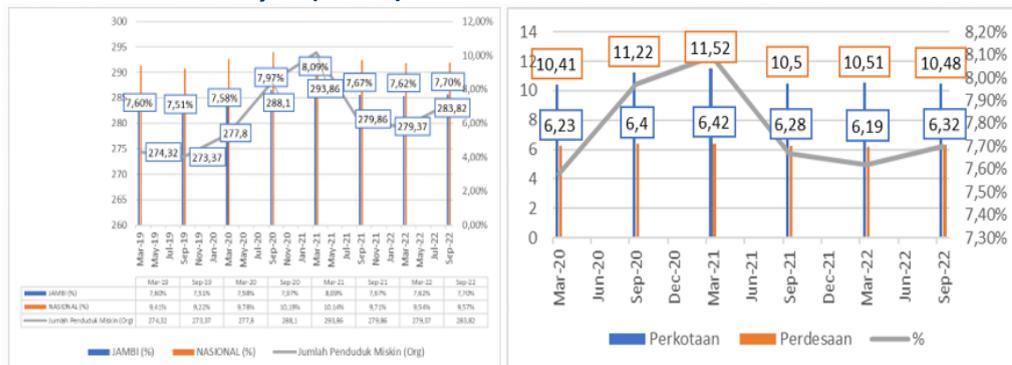
Indikator terakhir yaitu standar hidup layak yang diukur menggunakan pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan pada tahun ini.

Pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp11,160 juta pada tahun 2023, meningkat Rp289 ribu dibandingkan dengan tahun 2022. Meningkatnya pendapatan per kapita ini juga menjadi pertanda bahwa penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. Namun demikian, peningkatan nilai IPM ini harus dipahami secara substansi. Nilai IPM yang saat ini masih menggunakan tiga indikator yang terkait dengan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup

layak tidak menunjukkan korelasi yang positif terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dikarenakan arah kebijakan pemerintah tidak mengarah pada outcome dari indikator IPM namun hanya sebatas output. Tidak hanya itu, output yang dihasilkan juga belum diarahkan secara spesifik untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, namun hanya sebatas memenuhi standar persyaratan untuk dapat meningkatkan indeks IPM saja. Akibatnya, peningkatan yang riil dari nilai IPM ini tidak serta merta mencerminkan kualitas masyarakat yang lebih baik meskipun terlihat baik secara angka statistika.

3. Tingkat Kemiskinan

Grafik 3.7 Perkembangan Kemiskinan Provinsi Jambi (kiri) dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah (kanan)



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 2023 berada di angka 7,58%. Persentase penduduk miskin turun 0,12% terhadap September 2022 dan turun 0,04% terhadap Maret 2022. Tingkat kemiskinan tersebut di satu sisi lebih baik apabila dibanding dengan target RPJMD tahun 2021-2026 yang sebesar 7,9%, namun di sisi lain tingkat kemiskinan Provinsi Jambi masih berada direntang target target nasional sebesar 7,5%-8,5%.

Berdasarkan data sampai dengan bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 280,68 ribu orang, turun 3,1 ribu orang terhadap September 2022. Sedangkan untuk Maret 2023, garis kemiskinan ialah sebesar Rp599.688 yang mana nilai tersebut naik 2,34% dibandingkan September 2022. Sementara itu, distribusi garis kemiskinan adalah sebesar 75,45% dari makanan dan 24,55% dari bukan makanan yang berarti bahwa peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Inflasi Provinsi Jambi banyak didorong oleh komoditas komponen bergejolak yang mana didalamnya adalah makanan dan minuman. Beras menjadi komoditas penyumbang terbesar terhadap kenaikan garis kemiskinan Maret 2023. Pemerintah perlu mewaspadaai ancaman El Nino yang dapat menyebabkan gangguan rantai produksi makanan pokok serta kebijakan proteksi dari negara-negara eksportir makanan pokok. Disisi lainnya, komponen rokok kretek masih memberikan andil yang besar terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jambi. Hal ini

didorong oleh masih besarnya konsumsi rokok di level masyarakat kecil serta kebijakan peningkatan tarif cukai rokok. Dari kondisi ini, kebijakan eksternalitas fiskal atas cukai rokok perlu disertai dengan kebijakan untuk menyadarkan masyarakat agar mementingkan konsumsi lain selain rokok.

Grafik 3.8 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1-Grafik Atas) dan Keparahan Kemiskinan (P2-Grafik Bawah) 2019-2023



Sumber: BPS Nasional dan BPD Prov. Jambi (data diolah)



Sumber: BPS Nasional dan BPD Prov. Jambi (data diolah)

Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi pada bulan Maret 2023 menurun dibandingkan bulan September 2022. Namun apabila dibandingkan dengan periode yang sama di bulan Maret 2022, indeks kedalaman kemiskinan ini di perdesaan mengalami kenaikan. Komoditi Beras dan Rokok Kretek Filter menjadi dua komoditi penyumbang terbesar pada garis kemiskinan bulan Maret 2023. Beberapa bauran kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain:

1. Pemerintah Daerah:

- a. Pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan kepada keluarga dibawah garis kemiskinan oleh pemerintah daerah untuk 1000 KK pada 11 kab/kota;
- b. Penyaluran BLT Desa sebanyak 44.133 KPM dan Bantuan Sembako 334.891 KPM;
- c. Penyediaan infrastruktur layanan dasar, antara lain: Bantuan rehabilitasi rumah di desa sebanyak 75 unit, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan melalui kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat pada 11 kab/kota, dan Jaringan SPAM sebanyak 10.517 Sambungan Rumah tangga.

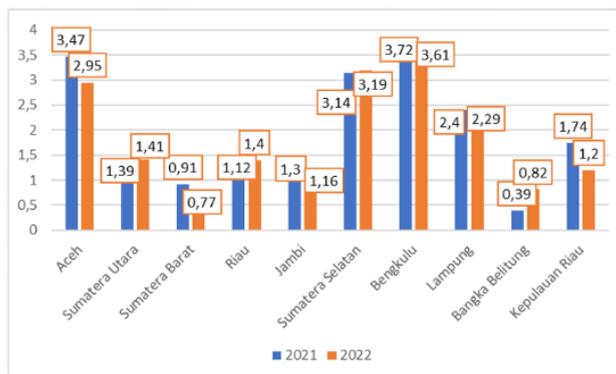
2. Pemerintah Pusat:

- a. Penyaluran Bantuan PKH kepada 453.608 KPM;
- b. Penyediaan infrastruktur layanan dasar, antara lain: Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan melalui kegiatan Penyelenggaraan koordinasi satgas percepatan penurunan stunting pada 11 kab/kota;

- c. Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi, Penurunan kematian Ibu dan Bayi pada 96.922 keluarga, dan 315 fasilitas kesehatan;
- d. Pengembangan sistem penyelenggaraan air minum SPAM 3.700 unit dan penyediaan sanitasi layak aman SPALD-T/S 2.000 KK;
- e. Pendataan registrasi sosial ekonomi untuk penyelenggaraan bansos/subsidi tepat sasaran.

Pemerintah tetap berupaya menyempurnakan proses pemberian bantuan-bantuan sosial tersebut untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penentuan masyarakat penerima bantuan. Selain itu, pemerintah juga perlu memfokuskan pada jenis bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah perlu memperhatikan tipologi penduduk miskin tersebut. Untuk penduduk dengan pengeluaran jauh dibawah garis kemiskinan, program bantuan dapat difokuskan dalam bentuk bantuan-bantuan langsung (tunai dan non tunai). Namun demikian, untuk penduduk dengan pengeluaran mendekati garis kemiskinan, sebaiknya program bantuan lebih difokuskan pada bantuan-bantuan modal dan keterampilan usaha.

Grafik 3.9 Perbandingan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2021 dan 2022



Sumber: SUSENAS BPS

Apabila dilihat lebih jauh dari sisi sudut pandang tingkat kemiskinan ekstrim, Provinsi Jambi menjadi salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang dapat menekan angka kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim Provinsi

Jambi berada pada angka 1,16% turun 0,14% dibanding tahun 2021. Momentum penurunan tingkat kemiskinan ekstrim harus dijaga dengan memaksimalkan bauran kebijakan untuk mencapai target prioritas nasional 2024 bebas kemiskinan ekstrim.

4. Ketimpangan (Gini Ratio)

Grafik 3.10 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi 2020-2023 (kiri) dan Perbandingan Rasio Gini Jambi dengan Provinsi lain lingkup Sumatera (kanan)



Sumber: BPS Nasional dan BPS Prov. Jambi (data diolah)

Target

RPJMD

Gini Ratio 2023

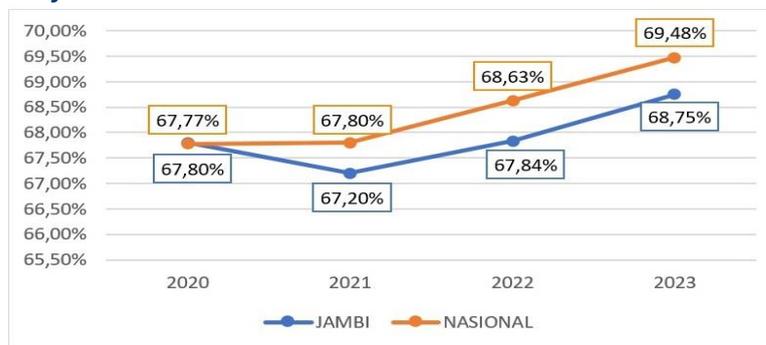
0,314

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Angka Gini Rasio atau tingkat ketimpangan cenderung berfluktuasi dimana periode Maret 2023 kembali meningkat 0,008 poin dari periode September 2022 menjadi 0,343. Tingkat ketimpangan ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional 0,388. Kemudian, gini rasio di Provinsi Jambi juga lebih baik daripada sasaran indikator pembangunan tahun 2022 (0,376-0,378) berdasarkan RPJMD. Semua gini rasio provinsi di Sumatera berada di bawah gini rasio nasional, namun Provinsi Jambi menempati urutan paling tinggi apabila dikomparasikan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera yang menandakan bahwa terdapat tingkat ketimpangan kesejahteraan yang relatif tinggi.

5. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Grafik 3.11 TPAK Nasional dan TPAK Jambi 2023



**Target
RPJMD
TPT 2023
4,61%**

Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,92% dan TPAK perempuan sebesar 49,23%.

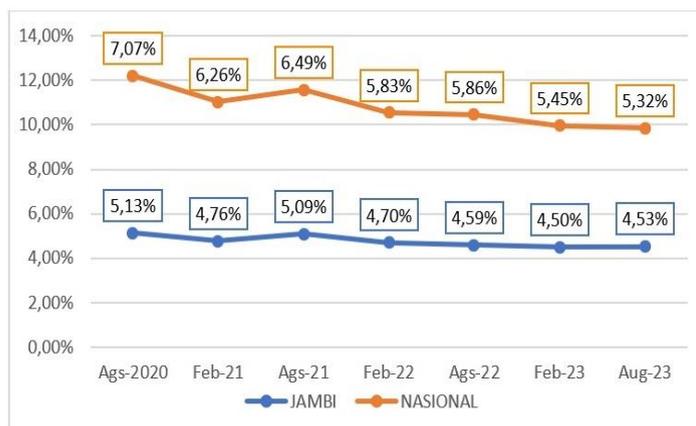
Grafik 3.12 Struktur Ketenagakerjaan



Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Dari total penduduk Jambi sebesar 3,63 juta jiwa, jumlah penduduk yang Berusia Kerja sebesar 2,75 juta orang dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 1,89 juta orang dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 860 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja naik 4,4 ribu orang menjadi 1,80 juta orang dan jumlah pengangguran turun 880 orang menjadi 85,6 ribu orang.

Grafik 3.13 TPT Nasional dan TPT Jambi 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi tercatat menurun 0,20% menjadi 4,53% dibandingkan kondisi y-o-y pada Agustus tahun 2022 sebesar 4,59% yang menandakan bahwa keadaan ketenaga-kerjaan semakin membaik seiring

dengan proses pemulihan ekonomi regional meskipun relatif lambat. Jumlah pekerja yang bekerja secara penuh atau lebih dari 35 jam dalam seminggu meningkat 47 ribu orang menjadi 1,07 juta orang dibandingkan dengan periode Agustus 2022. Jumlah pekerja paruh waktu menurun 14 ribu orang menjadi 0,56 juta orang dan jumlah pekerja setengah pengangguran menurun 32 ribu orang menjadi 0,13 juta orang. Angkatan kerja mengalami peningkatan dikarenakan sudah mulai kembali bekerja seiring pulihnya aktivitas sektor-sektor usaha.

Tabel 3.2 Data PHK Per-Sektor Usaha Tahun 2022

Sektor Usaha	s.d. Juni	s.d. Okt	s.d. Des
Perdagangan, Jasa dan Investasi	19	23	66
Keuangan	10	10	16
Pertambangan	1	1	6
Pertanian/ Perikanan	316	673	863
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	12	12	10
Aneka Sektor Industri dan Industri Dasar Kimia	3	38	108
Pendidikan	4	4	5
Lain-lain	1	1	32
Jumlah	366	762	1106

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jambi

Data dari Disnakertrans Provinsi Jambi sampai dengan bulan Desember 2022, tercatat 1.106 pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sektor penyumbang PHK terbesar adalah sektor Pertanian dan Perkebunan sebanyak 863 pekerja. PHK disektor Industri mengalami peningkatan jumlah pegawai PHK dari 38 orang (s.d. Oktober 2022) menjadi 108 orang (s.d. Desember 2022). Hal ini perlu menjadi

perhatian mengingat ketergantungan bahan produksi dari sektor industri terhadap bahan baku impor yang berasal dari perdagangan global. Pemerintah pusat maupun daerah melalui berbagai bauran kebijakan terus berupaya untuk menekan angka tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan tersebut diantaranya: program padat karya, program pendidikan vokasi & pelatihan kompetensi, pengembangan kawasan industri minyak sawit (KI Kemuning), kartu pra kerja serta program-program lain yang secara langsung dan maupun tidak langsung mendorong penyerapan tenaga kerja.

Bauran kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran, antara lain:

1. Pembangunan Unit Pengolahan Minyak Sawit Industri di Perdesaan dekat Perkebunan;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada 11 kab/kota;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas Binalavotas, sebanyak 10 lembaga;
4. Pelatihan magang bidang industri di perusahaan dalam negeri;
5. Pelatihan peningkatan produktivitas bidang industri.

c. Matriks perbandingan sektor ekonomi dan komoditas unggulan antar daerah

Dari hasil klasifikasi sektoral berdasarkan nilai Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) di Provinsi Jambi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor salah satu yang merupakan sektor potensial daerah. Namun masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkannya, antara lain:

- 1) Produk lokal yang belum mampu bersaing dengan produk luar.
- 2) Potensi aktivitas ekspor yang masih belum maksimal.
- 3) Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas dalam distribusi.

Untuk dapat menanggulangi berbagai tantangan dan menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi komoditas unggulan daerah, dapat dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan hilirisasi produk
- 2) Membangun sarana infrastruktur, meningkatkan nilai tambah dan memperkuat jaringan informasi pasar
- 3) Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan

d. Matriks perbandingan pendapatan daerah dan pusat (Alokasi dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan)

1. Pendapatan Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2023, Pendapatan Daerah mencapai Rp17.993,16 miliar atau terealisasi sebesar 105,5% dari pagu. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,67% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tren 3 tahun, realisasi pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.315,55 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp14.592,62 miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar Rp84,99 miliar.

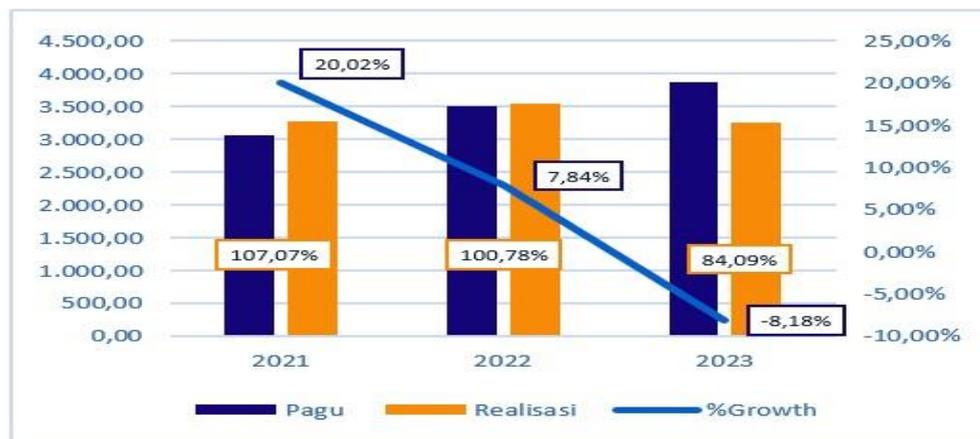
Grafik 3.14 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023



Sumber : GFS, LHP (data diolah)

a) Pendapatan Asli Daerah

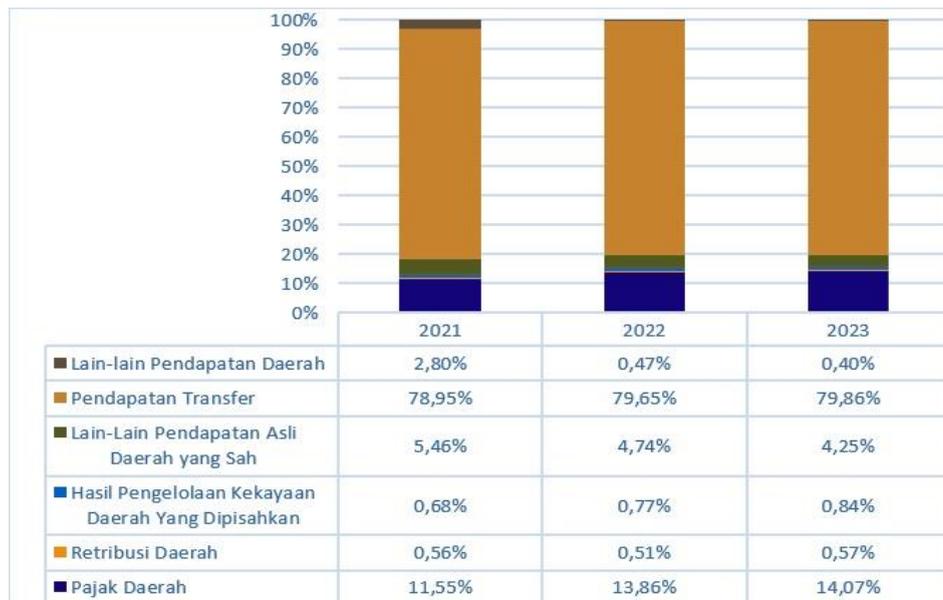
Grafik 3.15 Realisasi dan Pertumbuhan PAD Tahun 2021-2023



Sumber : GFS, LHP (data diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD), dan Lain-Lain PAD yang Sah (LLPDyS). Pada tahun 2023, PAD seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi terealisasi sebesar Rp3.244,51 miliar atau 84,09% dari target atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 3.16 Komposisi PAD tahun 2023



Sumber : GFS, LHP (data diolah)

Jika dilihat dari kontribusi PAD Provinsi Jambi pada tiga tahun terakhir, secara keseluruhan PAD memiliki komposisi dibawah 20% terhadap total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2021-2023, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah adalah Pajak Daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,16% diikuti dengan LLPDyS dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,82%. Sementara itu, Retribusi Daerah dan HPKDD memiliki kontribusi dibawah 1%. Pada tahun 2023, Pendapatan Daerah sebesar Rp16,440,01 miliar disokong oleh 79,86% Pendapatan Transfer, 19,74% PAD, dan 0,40% Lain-Lain Pendapatan Daerah. PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar 14,07%, Retribusi Daerah sebesar 0,57%, HPKDD sebesar 0,84%, dan LLPDyS sebesar 4,25%.

Grafik 3.17 Lima Pajak Daerah dengan Realisasi Tertinggi



Sumber : GFS, LHP (data diolah)

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan Pajak Daerah antara lain karena pulihnya aktifitas masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya aktifitas masyarakat yang berkunjung ke tempat rekreasi serta tempat-tempat hiburan.

Salah satu sumber pendapatan yang mencerminkan ini adalah dari meningkatnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Lima pajak tersebut berkontribusi sebesar 82,23% terhadap Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar Rp547,17 miliar atau 23,66% dari total Pajak Daerah. Sejalan dengan menurunnya kasus covid-19 di Provinsi Jambi, meningkatnya aktifitas masyarakat ini juga memiliki dampak lanjutan. Dampak lanjutan dari peningkatan aktifitas tersebut adalah tumbuhnya tingkat hunian hotel. Tingkat hunian hotel yang tinggi juga akan berdampak langsung karena pajak hotel merupakan salah satu PAD di Provinsi Jambi.

b) Pendapatan Transfer

Grafik 3.18 Realisasi dan Pertumbuhan, serta Kontribusi Pendapatan Transfer Tahun 2021-2023



Pada tiga tahun terakhir, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total Pendapatan Daerah di Provinsi Jambi. Pendapatan transfer pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp13.129,47 miliar atau 85,65% dari pagu. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2022, Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan negatif sebesar 12,87%. Meskipun demikian, peran Pendapatan Transfer masih dominan dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya. Di tahun 2023, 79,86% Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer. Pada tiga tahun terakhir, penyumbang terbesar dana Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan kontribusi di atas 78%. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya menyumbang sebesar 0,09% yaitu pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas 91,90% Dana Perimbangan, 7,29% Dana Desa, dan 0,81% Dana Insentif Daerah.

Tingginya kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menunjukkan tingginya peran pemerintah pusat dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah harus benar-benar serius untuk menggali potensi daerah sehingga tingkat ketergantungan terhadap transfer dari pusat

dapat berkurang. Hal ini sejalan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana salah satu tujuan ditetapkannya UU ini untuk mendorong kemandirian dan kapasitas fiskal daerah.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)

Grafik 3.19 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2023



Sumber : GFS, LHP (data diolah)

Pada tahun 2023, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah telah terealisasi sebesar Rp66,03 miliar atau 92,65% dari pagu dan tumbuh negatif 20,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LLPDyS mengalami tren penurunan dalam tiga tahun berturut-turut, namun dampak penurunan tersebut dirasakan tidak terlalu signifikan karena kontribusinya yang rendah dalam struktur pendapatan daerah. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah perbaikan tata kelola administrasi penginputan data penerimaan dari LLPDyS ke pendapatan asli daerah atau pendapatan transfer.

2. Pendapatan Pemerintah Pusat

Grafik 3.20 I-Account APBN Provinsi Jambi Tahun 2021-2023

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2021			TA 2022			TA 2023			% Growth 2022- 2023
	PAGU	REALISASI	% REAL	PAGU	REALISASI	% REAL	PAGU	REALISASI	% REAL	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	5.390,39	6.576,30	122,00%	6.507,90	7.530,34	115,71%	7.074,58	8.391,88	118,62%	11,44%
P. Perpajakan	5.064,88	5.850,70	115,52%	5.951,55	6.746,42	113,36%	6.463,27	7.412,61	114,69%	9,87%
PNBP	325,51	725,59	222,91%	556,35	783,92	140,90%	611,31	979,28	160,19%	24,92%
Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA NEGARA	21.692,77	21.161,37	97,55%	22.229,19	21.455,79	96,52%	24.676,83	24.150,56	97,87%	12,56%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	7.319,82	6.903,61	94,31%	7.157,94	6.863,17	95,88%	9.366,05	8.955,84	95,62%	30,49%
B. Pegawai	2.548,05	2.567,83	100,78%	2.617,06	2.578,37	98,52%	2.674,95	2.621,68	98,01%	1,68%
B. Barang	2.658,77	2.475,23	93,10%	2.448,25	2.322,15	94,85%	3.322,66	3.170,87	95,43%	36,55%
B. Modal	2.096,95	1.844,51	87,96%	2.072,14	1.942,17	93,73%	3.341,84	3.136,70	93,86%	61,50%
B. Bansos	16,05	16,05	100,00%	20,48	20,48	100,00%	26,59	26,59	100,00%	29,83%
B. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	14.372,95	14.257,75	99,20%	15.071,26	14.592,62	96,82%	15.310,78	15.194,72	99,24%	4,13%
Dana Transfer Umum (DTU)	9.680,86	9.678,92	99,98%	10.821,89	10.558,77	97,57%	10.890,59	10.848,31	99,61%	2,74%
Dana Alokasi Umum	7.402,17	7.402,17	100,00%	7.404,53	7.404,53	100,00%	7.706,63	7.672,33	99,55%	3,62%
Dana Bagi Hasil	2.278,69	2.276,75	99,91%	3.417,36	3.154,24	92,30%	3.183,96	3.175,98	99,75%	0,69%
Dana Transfer Khusus (DTK)	3.208,11	3.097,94	96,57%	2.994,50	2.781,70	92,89%	3.096,71	3.035,36	98,02%	9,12%
DAK Fisik	1.181,53	1.113,88	94,27%	1.053,71	992,76	94,22%	1.118,66	1.087,39	97,20%	9,53%
DAK Non Fisik	2.026,58	1.984,06	97,90%	1.940,79	1.788,94	92,18%	1.978,05	1.947,97	98,48%	8,89%
Dana Otsus, DIY, DID	261,84	261,84	100,00%	132,49	132,49	100,00%	131,17	123,59	94,22%	-6,72%
Dana Otsus, DIY, DID	261,84	261,84	100,00%	132,49	132,49	100,00%	131,17	123,59	94,22%	-6,72%
Dana Desa	1.222,14	1.219,05	99,75%	1.122,38	1.119,65	99,76%	1.192,30	1.187,46	99,59%	6,06%
Dana Desa	1.222,14	1.219,05	99,75%	1.122,38	1.119,65	99,76%	1.192,30	1.187,46	99,59%	6,06%
SURPLUS/DEFISIT	-16.302,38	-14.585,07	89,47%	-15.721,29	-13.925,45	88,58%	-17.602,25	-15.758,68	89,53%	13,16%
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SikPA)	-16.302,38	-14.585,07	89,47%	-15.721,29	-13.925,45	88,58%	-17.602,25	-15.758,68	89,53%	13,16%

Sumber : OM SPAN, MEBE, KPP Lingkup Prov. Jambi, KPPBC Jambi (data diolah)

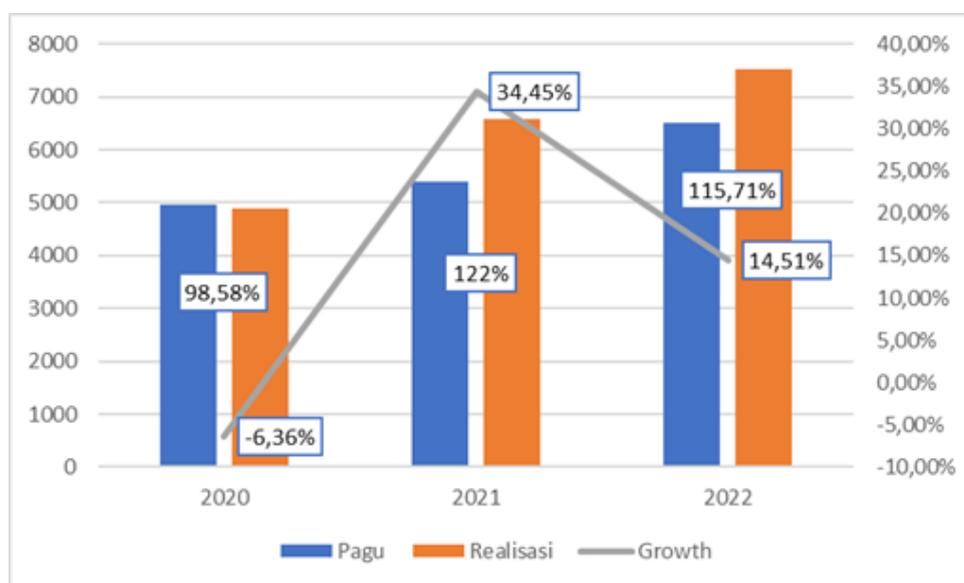
Pada tahun 2023, target Pendapatan Negara di Provinsi Jambi meningkat menjadi Rp7.074,58 miliar atau naik sebesar 8,71% dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp6.507,90 miliar. Hal tersebut merupakan optimisme pemerintah terhadap pemulihan aktivitas perekonomian di Provinsi Jambi. Capaian realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Jambi menunjukkan angka yang memuaskan. Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp8.391,88 miliar atau mencapai 118,62% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,44% dibandingkan dengan tahun 2022. Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp7.412,61 miliar (114,69% dari pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 9,87%. Penerimaan PNBPNP terealisasi sebesar Rp979,28 miliar (160,19% dari pagu) dan mengalami pertumbuhan hingga mencapai 24,92%.

Sementara dari sisi Belanja Negara, alokasi pagu anggaran untuk Provinsi Jambi adalah sebesar Rp24.676,83 miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9.366,05 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp15.310,78 miliar. Pagu belanja tersebut mengalami peningkatan

sebesar 11,01% dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp24.150,56 miliar atau 97,87% dari target pagu yang telah ditetapkan. Belanja Negara mengalami peningkatan realisasi sebesar 12,56% dibandingkan dengan tahun 2022. BPP terealisasi sebesar Rp8.955,84 miliar (95,62% dari pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 30,49%. Sedangkan TKDD terealisasi sebesar Rp15.194,72 miliar (99,24% dari pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,13%. Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendorong akselerasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Kementerian/Lembaga) dengan melakukan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala khususnya dengan 20 satuan kerja dengan pagu terbesar.

a) Pendapatan Negara

Grafik 3.21 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Negara Tahun 2021-2023



Sumber : OM SPAN, MEBE, KPP Lingkup Prov. Jambi, KPPBC Jambi (data diolah)

1) Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Tahun 2021-2023

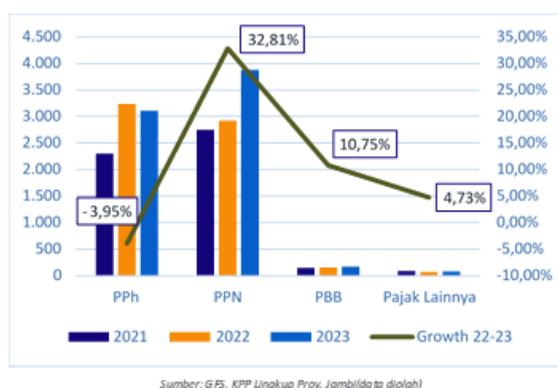
Jenis Pajak	2021		2022		2023		% Growth 22-23
	Pagu	Real	Pagu	Real	Pagu	Real	
PPh	2.395,70	2.297,72	2.910,52	3.235,21	2.867,06	3.107,35	-3,95%
PPN	2.305,91	2.745,87	2.336,47	2.920,46	3.015,42	3.878,63	32,81%
PBB	205,90	147,18	311,98	152,05	362,47	168,40	10,75%
Pajak Lainnya	91,45	88,27	83,82	69,73	77,54	73,03	4,73%
Bea Masuk	10,17	8,18	5,83	8,51	16,75	22,45	163,68%
Bea Keluar	49,46	563,49	302,93	360,05	124,04	162,74	-54,80%
Cukai	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	-100,00%
Pajak Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	5.058,58	5.850,70	5.951,55	6.746,42	6.463,27	7.412,61	9,87%

Sumber: GFS (data diolah)

Pada tahun 2023, Pendapatan Perpajakan mampu menorehkan prestasi yang sangat membanggakan dengan tercapainya target perpajakan dengan realisasi mencapai 114,69% dari pagu. Tercapainya target perpajakan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Stabilitasnya harga komoditas batu bara dan sawit berpengaruh terhadap kenaikan PPh Badan;
- b. Kenaikan harga komoditas sawit terutama produk turunannya berpengaruh terhadap kenaikan PPN Dalam Negeri;
- c. PMK 59 Tahun 2022 berpengaruh terhadap kenaikan kontribusi pajak bendahara;
- d. Perubahan PER-07 menjadi PER-05 berpengaruh terhadap kenaikan PPh Pasal 21.

Grafik 3.22 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Perpajakan Tahun 2021 – 2023

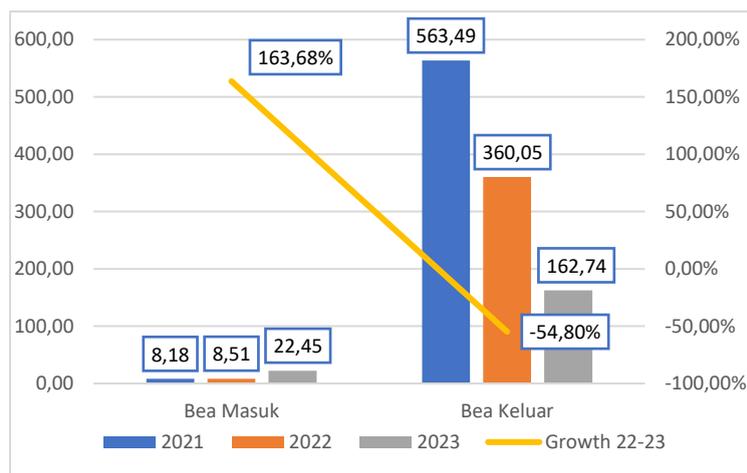


Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2023 di Provinsi Jambi mencapai Rp7.412,61 miliar atau 114,69% dari pagu. Dilihat secara porsi, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih menjadi penopang utama

penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp3.107,35 miliar (PPh) dan Rp3.878,63 miliar (PPN). Pajak Penghasilan (PPh Tahunan Badan, PPh Final, dan PPh Non Migas Lainnya) mengalami pertumbuhan yang signifikan, selain karena adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), juga dikarenakan meningkatnya daya beli aktivitas rumah tangga/household yang mendukung penambahan omzet bagi Wajib Pajak Badan (corporate). PPM (Pengawasan Penerimaan Masa) masih mendominasi penerimaan Jambi dibandingkan dengan penerimaan atas PKM (Pengawasan Kepatuhan Material).

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, seluruh komponen penerimaan perpajakan mengalami peningkatan kecuali pada PPh yang mengalami penurunan sebesar 3,95%. Peningkatan tertinggi terdapat pada PPN yang meningkat sebesar 32,81%. Apabila dilihat dari Porsi penerimaan Jenis Wajib Pajak, penerimaan perpajakan di Provinsi Jambi didominasi oleh Wajib Pajak Badan, kemudian secara berturut-turut Wajib Pajak Rumah tangga/Orang Pribadi dan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah.

Grafik 3.23 Pertumbuhan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2021-2023



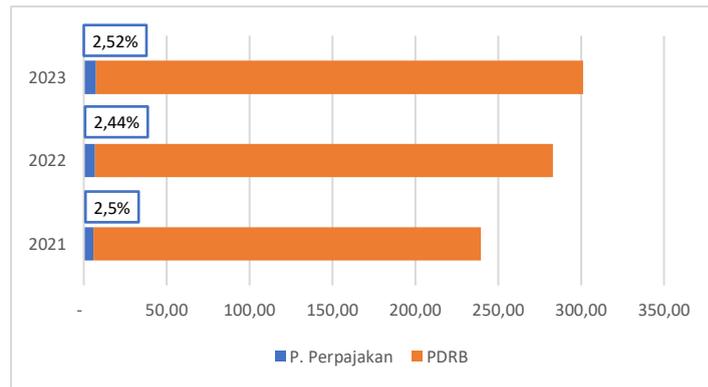
Sumber: : GFS, KPPBC Jambi (data diolah)

Nilai penerimaan Bea Masuk pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif hingga mencapai 163,68% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan adanya peningkatan pada impor kacang tanah, pompa sentrifugal, dan mesin pencuci elektrik. Penerimaan Bea Masuk tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya pengembalian Bea Masuk KITE sebesar Rp165,82 juta dan Bea Masuk atas PIB Fasilitas Penundaan (vouritslagh) sebesar Rp 18,87 juta.

Namun, nilai penerimaan Bea Keluar pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan pertumbuhan negatif sebesar -54,8%. Penerimaan Bea Keluar tahun 2023 didominasi oleh komoditi cangkang sawit sebesar Rp67,26 miliar dan CPO sebesar Rp56,18M. Penerimaan Bea Keluar tahun 2023 dipengaruhi pengembalian (restitusi) kelebihan pembayaran karena salah tarif dengan nilai pengembalian Rp2,42 miliar dan hasil keputusan Pengadilan Pajak sebesar Rp1,80 miliar.

Negara tujuan ekspor komoditi cangkang kelapa sawit terbesar adalah Jepang. Akibat dari kebijakan di Negara Jepang yang tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir tetapi meningkatkan jumlah pembangkit listrik yang menggunakan biomassa maka kebijakan energi Jepang menetapkan 24% pemenuhan energi di Jepang pada 2030 harus berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Pada Tahun 2023, kebutuhan cangkang sawit semakin meningkat disebabkan karena jumlah pembangkit listrik yang menggunakan biomassa semakin bertumbuh di Jepang. Jenis barang impor utama s.d. Desember 2023 adalah pulp kayu dengan devisa impor sebesar USD21,15 juta, sedangkan jenis barang ekspor utama s.d. Desember 2023 adalah batubara (USD364,87 juta) dan karet mentah (USD187,68 juta).

Grafik 3.24 Analisis Tax Rasio Tahun 2021-2023



Sumber: GFS, KPP Lingkup Prov. Jambi, BPS (data diolah)

Rasio Pajak (tax ratio) merupakan perbandingan Pendapatan Perpajakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Rasio ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja Pendapatan Perpajakan. Jika dilihat dari tax ratio-nya, Provinsi Jambi masih sangat rendah di rentang 2% dalam 3 tahun terakhir. Meskipun perolehan perpajakan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun persinya terhadap PDRB masih cenderung sama yaitu sebesar 2,52%. Rasio pajak yang masih rendah ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi-potensi pajak yang belum dimaksimalkan di Provinsi Jambi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

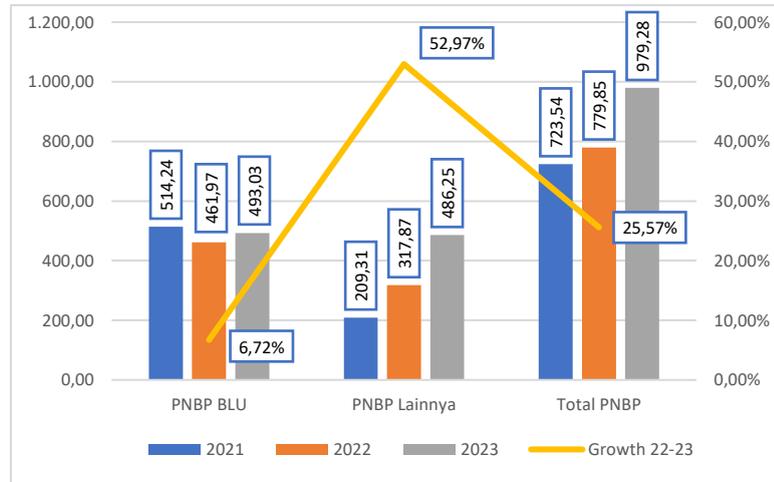
- a) Masih rendahnya kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak;
- b) Rendahnya nilai tambah dalam usaha karena kebanyakan masih berupa produk primer;
- c) Sulitnya akses untuk mendatangi wajib pajak;
- d) Kurangnya SDM dengan rasio antara account representative pajak dan wajib pajak pada rentang 1:100.000 hingga 1:120.000;
- e) Tingginya risiko dalam melakukan ekstensifikasi pajak bahkan tidak jarang terjadi ancaman pembunuhan dari pelaku usaha ketika dilakukan survei.

2) PNBP

Pada tahun 2023, PNBP Provinsi Jambi telah terealisasi sebesar Rp979.28 miliar atau mencapai 160,19% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 24,92% dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi PNBP masih didominasi oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp493,03 miliar atau 50,35% dari total penerimaan PNBP. Pendapatan ini terutama berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang terealisasi sebesar Rp322,41 miliar atau 65,39% dari total PNBP BLU. Jika

dibandingkan dengan tahun 2022, PNBP BLU mengalami pertumbuhan positif menjadi sebesar 6,72%.

Grafik 3.25 Realisasi PNBP Tahun 2021-2023 (dalam miliar Rupiah)



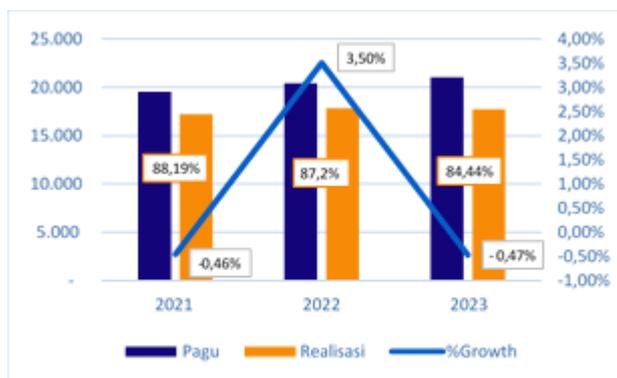
Sumber: GFS (data diolah)

Sementara itu, capaian untuk PNBP Lainnya telah terealisasi sebesar Rp486,25 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 52,97% dibandingkan dengan tahun 2022. Secara keseluruhan, PNBP Lainnya berkontribusi sebesar 49,65% dari total penerimaan PNBP. Peningkatan realisasi PNBP menjadi cermin stabilnya aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi. Pendapatan terbesar PNBP Lainnya secara berurutan adalah dari Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL, Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

e. Matriks perbandingan belanja antar daerah dan pusat (Alokasi dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan)

1. Belanja Daerah

Grafik 3.26 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Tahun 2021-2023



Sumber: GFS, LHP (data diolah)

Dari sisi belanja, pagu Belanja Daerah lingkup Provinsi Jambi tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp17.746,07 miliar atau 84,44% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp11.742,65 miliar, Belanja Modal sebesar Rp4.059,98 miliar, Belanja Tidak

Terduga Rp10,31 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp1.933,14 miliar. Apabila

dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan yang negatif sebesar 0,47% pada Belanja Operasi. Penurunan ini berdampak signifikan karena peran Belanja Operasi yang cukup besar secara porsi.

2. Belanja Negara

a. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

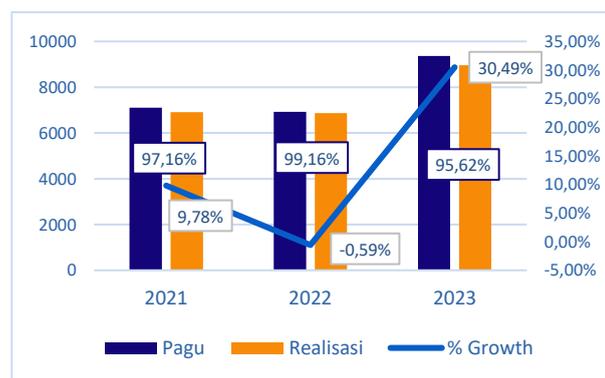
Tabel 3.3 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021 – 2023 (dalam Miliar Rupiah)

	TA 2021			TA 2022			TA 2023			% Growth 2022-2023
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	7.105,28	6.903,61	97,16%	6.921,57	6.863,17	99,16%	9.366,05	8.955,84	95,62%	30,49%
B. Pegawai	2.545,89	2.567,83	100,86%	2.613,80	2.578,37	98,64%	2.674,95	2.621,68	98,01%	1,68%
B. Barang	2.636,18	2.475,23	93,89%	2.440,90	2.322,15	95,13%	3.322,66	3.170,87	95,43%	36,55%
B. Modal	1.907,16	1.844,51	96,72%	1.846,39	1.942,17	105,19%	3.341,84	3.136,70	93,86%	61,50%
B. Bansos	16,05	16,05	100,00%	20,48	20,48	100,00%	26,59	26,59	100,00%	29,83%

Sumber : GFS, OM SPAN (data diolah)

Pada tahun 2023, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp8.955,84 miliar atau 95,62% dari total pagu Belanja Negara. Pada periode ini, realisasi BPP terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp2.621,68 miliar atau 98,01% dari pagu, Belanja Barang sebesar Rp3.170,87 miliar atau 95,43% dari pagu, Belanja Modal sebesar Rp3.136,70 miliar atau 93,86% dari pagu, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp26,59 miliar atau 100% dari pagu. Sementara itu, komponen Belanja Hibah, Belanja Lain-Lain, Belanja Pembayaran Bunga Utang, dan Belanja Subsidi tidak memiliki kontribusi terhadap Belanja Negara untuk tahun anggaran 2023.

Grafik 3.27 Realisasi dan Pertumbuhan BPP Tahun 2021-2023



Sumber: GFS, KPP Linakup Prov. Jambi (data diolah)

Secara keseluruhan, BPP tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 30,49% apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan realisasi BPP tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi pada Belanja Pegawai, Belanja

Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. belanja pegawai tumbuh disebabkan karena penambahan jumlah pegawai di tahun 2023 pada Kementerian Agama, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Belanja Barang tumbuh karena peningkatan belanja honor output kegiatan pada satker-

satker KPU dan Bawaslu, adanya bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya, dan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai Universitas Jambi Kemendikbud ristek. Belanja modal mengalami pertumbuhan karena realisasi proyek PSN Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tempino-Bayung Lincir. Kemudian, Belanja Bantuan Sosial meningkat signifikan karena percepatan penyaluran bantuan sosial program Bidik Misi dan KIP Kuliah di bulan April dan realisasi belanja bantuan sosial oleh Satker Sentra Alyatama.

Selain itu, pagu anggaran BPP juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,34%. Berdasarkan besaran peningkatan pagu K/L, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengalami peningkatan pagu anggaran terbesar yaitu masing-masing meningkat sebesar 413,34% dan 242,92% yang dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan diadakan pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan terjadinya deviasi Belanja K/L terutama pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Tabel 3.4 Perkembangan TKDD Tahun 2021-2023

	2021			2022			2023			% Growth 2022 - 2023
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	14.372,95	14.257,75	99,20%	13.562,89	14.592,62	107,59%	15.369,90	15.194,72	98,86%	4,13%
Dana Transfer Umum (DTU)	9.680,86	9.678,92	99,98%	9.313,52	10.558,77	113,37%	10.890,59	10.848,31	99,61%	2,74%
Dana Alokasi Umum	7.402,17	7.402,17	100,00%	7.404,53	7.404,53	100,00%	7.706,63	7.672,33	99,55%	3,62%
Dana Bagi Hasil	2.278,69	2.276,75	99,91%	1.908,99	3.154,24	165,23%	3.183,96	3.175,98	99,75%	0,69%
Dana Transfer Khusus (DTK)	3.208,11	3.097,94	96,57%	2.994,50	2.781,70	92,89%	3.096,71	3.035,36	98,02%	9,12%
DAK Fisik	1.181,53	1.113,88	94,27%	1.053,71	992,76	94,22%	1.118,66	1.087,39	97,20%	9,53%
DAK Non Fisik	2.026,58	1.984,06	97,90%	1.940,79	1.788,94	92,18%	1.978,05	1.947,97	98,48%	8,89%
Otsus, DIY, DID	261,84	261,84	100,00%	132,49	132,49	100,00%	131,17	123,59	94,22%	-6,72%
Otsus, DIY, DID	261,84	261,84	100,00%	132,49	132,49	100,00%	131,17	123,59	94,22%	-6,72%
Dana Desa	1.222,14	1.219,05	99,75%	1.122,38	1.119,65	99,76%	1.192,30	1.187,46	99,59%	6,06%
Dana Desa	1.222,14	1.219,05	99,75%	1.122,38	1.119,65	99,76%	1.192,30	1.187,46	99,59%	6,06%

Sumber: GFS, DJPK (data diolah)

Pada tahun 2023, TKDD telah terealisasi sebesar Rp15.194,72 miliar atau 98,86% dari pagu dengan pertumbuhan 4,13% dibandingkan dengan tahun 2022. Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa mengalami pertumbuhan positif yaitu secara berurutan sebesar 2,74%, 9,12%, dan 6,06% dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, Dana Intensif Daerah (DID) mengalami pertumbuhan negatif sebesar -6,72%.

f. Matriks perbandingan rasio keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Laporan konsolidasian tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Laporan Konsolidasian Pemerintah Tahun 2021 – 2023

	TA 2021		TA 2022		TA 2023		% Growth 2022-2023
	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	PROPORSI	
PENDAPATAN KONSOLIDASI	10.278,41		11.207,35		11.691,98		4,32%
Pendapatan Perpajakan	7.924,92	77,10%	9.209,58	82,17%	9.719,46	83,13%	5,54%
PNBP	2.256,16	21,95%	1.949,56	17,40%	1.948,01	16,66%	-0,08%
Hibah	97,33	0,95%	48,21	0,43%	24,51	0,21%	-49,16%
BELANJA KONSOLIDASI	26.205,74		27.711,77		29.657,92		7,02%
Belanja Pemerintah	24.129,90	92,08%	25.186,56	90,89%	24.702,51	83,29%	-1,92%
Transfer	2.075,84	7,92%	2.525,21	9,11%	4.955,41	16,71%	96,24%
SURPLUS/DEFISIT	-15.927,33		-16.504,42		-17.965,94		-8,86%
PEMBIAYAAN	1.429,54		2.126,37		1.138,67		-46,45%
Penerimaan Pembiayaan	1.456,21	101,87%	2.352,97	110,66%	1.429,47	125,54%	-39,25%
Pengeluaran Pembiayaan	26,66	1,86%	226,6	10,66%	290,8	25,54%	28,33%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	-14.497,79		-14.378,05		-16.827,27		17,03%

Sumber : GFS, SIKRI (data diolah)

1. Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Grafik 3.28 Perbandingan Komposisi dan Pertumbuhan Pendapatan Konsolidasian Tahun 2021-2023



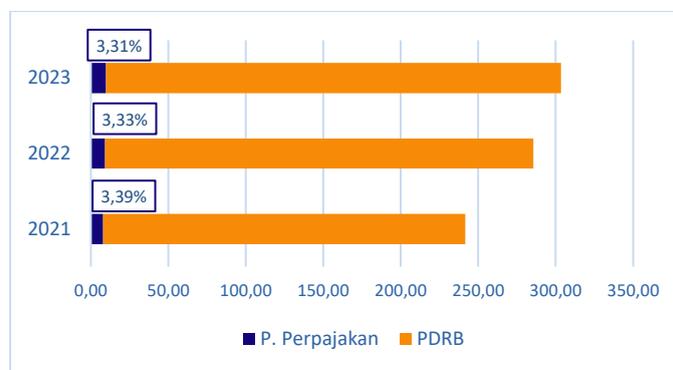
Sumber : GFS, SIKRI (data diolah)

Berdasarkan data tren 3 tahun sebelumnya, realisasi Pendapatan Konsolidasian terus mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2022, Pendapatan konsolidasian terealisasi sebesar Rp11.207,35 miliar atau naik 9,04% dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp10.278,41 miliar. Pada tahun 2023, Pendapatan Konsolidasian kembali naik sebesar 4,32% yaitu sebesar Rp11.691,98 miliar yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp9.719,46 miliar, PNBP sebesar Rp1.948,01 miliar dan Hibah sebesar Rp24,51 miliar.

Berdasarkan tren 3 tahun terakhir, terlihat komposisi terbesar Pendapatan Konsolidasian masih didominasi dari sektor perpajakan yang terus mengalami peningkatan realisasi. Pada tahun 2023, Pendapatan Perpajakan menyumbang 83,13% dari total Pendapatan Konsolidasian, lalu disusul oleh PNPB dengan kontribusi sebesar 16,66%, dan Hibah sebesar 0,21%. Pendapatan Perpajakan mengalami pertumbuhan 5,54% dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya kelonggaran aktifitas di masa pasca pandemi. Ramainya sektor kuliner yang ditandai dengan peningkatan kunjungan restoran, rumah makan, café, serta hotel. Peningkatan kunjungan ke tempat-tempat wisata turut berdampak positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Perajakan di Provinsi Jambi pada tahun 2023.

2. Analisis Tax Ratio

Tabel 3.6 Tax Ratio Konsolidasian Tahun 2021-2023



Sumber : GFS, SIKRI, BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Rasio Perpajakan (Tax Ratio) digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja Pendapatan Perpajakan dengan membandingkan Pendapatan Perpajakan dengan PDRB ADHB. Berdasarkan data tax rasio, rasio pada tahun 2023 sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jika melihat pada scope yang lebih besar, terlihat bahwa tax rasio tidak banyak berubah. Bahkan rasio ini tidak hanya bertahan pada 3 tahun terakhir saja, namun juga untuk tahun-tahun sebelumnya. Stagnasi rasio perpajakan ini menunjukkan bahwa kondisi perpajakan di Provinsi Jambi tidak banyak mengalami perkembangan. Hal ini juga disebabkan oleh struktur perekonomian Provinsi Jambi yang masih didominasi oleh sektor primer dimana pada sektor tersebut basis perpajakan relatif rendah, sektor informal relatif besar, serta jalur distribusi perdagangan yang masih konvensional.

3. Analisis Peran Pendapatan terhadap PDRB

Tabel 3.7 Perkembangan Peran Belanja Konsolidasian Terhadap PDRB

Tahun	Belanja Konsolidasi	PDRB ADHB	Rasio
2021	26.205,74	232.064	11,29%
2022	27.711,77	276.316	10,03%
2023	29.657,92	293.729	10,10%

Sumber : GFS, SIKRI, BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Jika kita lihat peran belanja pemerintah selama 3 tahun terakhir tidak banyak mengalami perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB dari sisi pengeluaran masih lebih didominasi oleh faktor konsumsi rumah tangga. Meskipun begitu, peran belanja pemerintah tetap sangat penting untuk menjaga ketahanan daya beli masyarakat dan sebagai stimulus perekonomian. Belanja pemerintah penting sebagai stabilisasi. Hal ini sangat terlihat ketika terjadi kenaikan inflasi belanja pemerintah mengambil peran sebagai shock absorber sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Hal ini terlihat di tahun 2023 ketika inflasi Provinsi Jambi lebih tinggi dibandingkan nasional, tingkat konsumsi masyarakat masih dapat tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi Provinsi Jambi. Belanja Pemerintah juga sangat penting sebagai stimulus untuk mendorong dampak multiplier aktifitas ekonomi. Hal ini pula yang mendorong agar realisasi Belanja Pemerintah harus didorong segera sejak awal tahun sehingga tidak harus selalu menumpuk di akhir tahun. Dengan adanya percepatan realisasi belanja Pemerintah sejak awal tahun maka momentum pertumbuhan ekonomi tetap dapat terjaga.

IV. Analisis Tata Kelola Keuangan Pusat dan Daerah

a. Matriks klasifikasi dan perbandingan peraturan terkait tata kelola keuangan daerah antar daerah

Tata kelola pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, transparan, dan produktif. Menurut *World Bank*, Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political *framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan yang menuju tata kelola yang baik terus membangun kultur budaya kerja yang transparan baik dari segi perlindungan kebebasan sosial, politik, maupun ekonomi, penyederhanaan birokrasi dan organisasi, pemberdayaan/peningkatan peran pengusaha kecil, serta keterbukaan informasi. Untuk itu Pemerintah Daerah menerbitkan Regulasi yang ditujukan untuk terlaksananya hal tersebut.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipengaruhi oleh manajemen keuangan daerah yang baik. Manajemen keuangan daerah mendukung Visi dan Misi

daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

Untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan pemerintah daerah menyusun APBD, seluruh pemerintah daerah digunakan Suatu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah sarana bagi Pemerintah untuk mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan informasi dan laporan pengelolaan Keuangan Daerah sebagai sarana menunjang tercapainya tata pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan keuangan dengan membentuk unit/satuan kerja/badan/dinas khusus yang menangani pelaksanaan keuangan daerah seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ataupun Bagian Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah disetiap pemerintah daerah.

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
Provinsi Jambi	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cata Pemberian

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
	Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jambi
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Kabupaten Batanghari	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Batang Hari
	Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
	Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Daerah Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bungo	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
	Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Bungo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo
Kabupaten Kerinci	Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kerinci
	Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Kerinci Nomor 34a Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci
	Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
	Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
	Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci
	Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Kabupaten Merangin	Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Muaro Jambi	Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi
	Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi
	Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
	dan penetapan rician dana desa di kabupaten Muaro Jambi TA.2021
	Peraturan Bupati Muaro Jambi tebvNomor 64 Tahun 2021 tentang perubahan atas perbup nomor 84 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan pengalokasian alokasi dana desa setiap desa TA.2021
Kabupaten Sarolangun	Peraturan Daerah Kabupaten Sarolnagun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa
	Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Sarolangun
	Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Tebo	Perda BPHTB, Perda Pajak Air Tanah, Perda Pajak Hiburan Nomor 16 Tahun 2021_001, Perda Pajak Hiburan, Perda Pajak Hotel, Perda Pajak Pakir, Perda Pajak Reklame, Perda Pajak Reklame_001, Perda Pajak Restoran, Perda Pajak Sarang Burung Walet 2021, Perda Pajak Sarang Burung Walet, Perda PBB, Perda PMBLB, Perda PPJ, Perda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2021_001
	Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
	Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sisdur Pengelolaan Keu Daerah, Perbup Perubahan Ketiga Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
	Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo
	Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
Kota Jambi	Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Jambi
	Peraturan Walikota Jambi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jambi
Kota Sungai Penuh	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh
	Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
	Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.18 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

b. Matriks perbandingan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan pusat dari peraturan pelaksanaan APBN

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik perlu didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih, untuk itu perlu dibuat aturan bagaimana berjalannya pemerintahan yang baik dengan penyelenggara pemerintah yang baik dan bersih. Pemerintah daerah se Provinsi Jambi selalu berusaha untuk mencapainya melalui penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan berpedoman juga pada Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Dari 12 Pemerintah Daerah yang ada di Jambi beberapa Peraturan daerah dan Peraturan Lain yang dapat di inventarisir yaitu:

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
Provinsi Jambi	Perda No. 1 Tahun 2023 Tanggal: 10-01-2023 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Batanghari	Perda No. 14 Tahun 2022 Tanggal: 26-12-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Bungo	Perda No. 3 Tahun 2022 Tanggal: 01-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Kerinci	Perda No. 8 Tahun 2022 Tanggal: 28-12-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Merangin	Perda No. 4 Tahun 2022 Tanggal: 30-12-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Muaro Jambi	Perda No. 4 Tahun 2022 Tanggal: 28-12-2021

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
	Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sarolangun	Perda No. 1 Tahun 2023 Tanggal: 03-01-2023 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Perda No. 6 Tahun 2022 Tanggal: 22-12-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perda No. 6 Tahun 2022 Tanggal: 29-12-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Tebo	Perda No. 13 Tahun 2022 Tanggal: 16-12-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kota Jambi	Perda No. 7 Tahun 2022 Tanggal: 27-12-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Kota Sungai Penuh	Perda No. 7 Tahun 2022 Tanggal: 30-12-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

V. Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah

a. Matriks perbandingan data temuan/catatan penting/ rekomendasi BPK atas LKPD terkait pelaksanaan anggaran daerah antar daerah

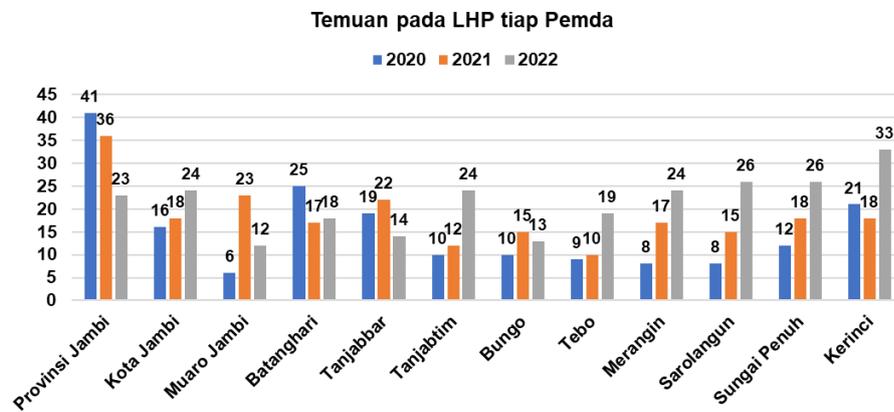
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dimulai sejak tahun 2006. Opini LKPD se-provinsi Jambi pada Tabel di bawah menunjukkan mulai membaiknya kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022.

Sampai dengan tahun 2022, sebanyak 11 Pemerintah Daerah telah berhasil mempertahankan opini WTP terhadap LKPD yang dihasilkan. Sementara itu, ada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang memperoleh opini WDP.

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Provinsi Jambi	WTP							
2	Kota Jambi	TMP	WTP						
3	Kabupaten Muaro Jambi	WDP	WTP						
4	Kabupaten Batang Hari	WTP							
5	Kabupaten Tanjabbar	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tanjabtim	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Bungo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
8	Kabupaten Tebo	WTP							
9	Kabupaten Merangin	WDP	WTP						
10	Kabupaten Sarolangun	WDP	WTP						
11	Kota Sungai Penuh	WTP							
12	Kabupaten Kerinci	WTP	WDP						

Sumber: Siaran Pers BPK Perwakilan Prov. Jambi

b. Matriks perbandingan data temuan/catatan penting/rekomendasi BPK atas LKPD terkait pelaksanaan anggaran daerah dengan data temuan/catatan penting/ rekomendasi BPK atas LKPP



Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 s.d. 2022, temuan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 256 temuan. Untuk temuan tahun 2022, temuan paling banyak berada di Kabupaten Kerinci sejumlah 33 temuan. Rata-rata temuan pada tahun 2022 adalah sebanyak 22 temuan, sedangkan untuk tahun 2021 sebanyak 18 temuan. Klasifikasi temuan untuk masing-masing pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Batanghari (18 Temuan)
 - a. Kelompok Pendapatan sebanyak 4 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 10 temuan
 - c. Kelompok Pembiayaan sebanyak 1 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 2 temuan
 - e. Kelompok Kewajiban sebanyak 1 temuan
- 2) Kabupaten Bungo (13 Temuan)
 - a. Kelompok Belanja sebanyak 11 temuan
 - b. Kelompok Aset sebanyak 2 temuan
- 3) Kabupaten Kerinci (33 Temuan)
 - a. Kelompok Pendapatan sebanyak 5 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 21 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 6 temuan
 - d. Kelompok Kewajiban sebanyak 1 temuan
- 4) Kabupaten Merangin (24 Temuan)
 - a. Kelompok Pendapatan sebanyak 4 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 13 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 7 temuan
- 5) Kabupaten Muaro Jambi (12 Temuan)

- a. Kelompok Penyusunan LK sebanyak 2 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 2 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 7 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 1 temuan
- 6) Kabupaten Sarolangun (26 Temuan)
- a. Kelompok Pendapatan sebanyak 2 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 20 temuan
 - c. Kelompok Pembiayaan sebanyak 1 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 3 temuan
- 7) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (14 temuan)
- a. Kelompok Penyusunan laporan keuangan sebanyak 1 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 11 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 2 temuan
- 8) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (24 temuan)
- a. Kelompok Penyusunan laporan keuangan sebanyak 1 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 2 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 15 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 6 temuan
- 9) Kabupaten Tebo (19 temuan)
- a. Kelompok Penyusunan laporan keuangan sebanyak 1 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 4 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 8 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 6 temuan
- 10) Kota Jambi (24 temuan)
- a. Kelompok Pendapatan sebanyak 6 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 14 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 4 temuan
- 11) Kota Sungai Penuh (26 temuan)
- a. Kelompok Pendapatan sebanyak 3 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 18 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 5 temuan
- 12) Provinsi Jambi (23 temuan)
- a. Kelompok Penyusunan laporan keuangan sebanyak 1 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 2 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 15 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 5 temuan

VI. Penutup

a. Kesimpulan

- 1) Capaian pembangunan dan ekonomi Provinsi Jambi pada 2023 dapat dikatakan mencapai prestasi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh dari 72,14 (2022) menjadi 73,73 (2023). Begitupula untuk gini ratio sedikit mengalami kenaikan dari 0,335 (2022) menjadi 0,343 (2023). Tingkat kemiskinan Kembali menurun dari 7,7% (2022) menjadi 7,58% (2023). Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2023 terus mengalami perbaikan, disatu sisi melebihi target RPJMD tahun 2021-2026 yaitu sebesar 7,9%, namun disisi lain tingkat kemiskinan masih dibawah target apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RKPD 2023 yaitu sebesar 7,10%. Hal ini juga sejalan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,09% (2022) menjadi 4,53% (2023). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi berada di level 4,03% dan mengalami pertumbuhan apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Inflasi gabungan Provinsi Jambi tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional (2,57%) dengan didorong oleh peningkatan harga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, beras, dan mobil.
- 2) Pendapatan APBN Provinsi Jambi tahun 2023 terealisasi sebesar Rp8.391,88 miliar (118,62%), tumbuh 11,44%. Pertumbuhan pendapatan ini didorong oleh pertumbuhan pajak sebesar 9,87% dan pertumbuhan penerimaan PNBPN sebesar 24,92%;
- 3) Belanja Negara sampai tahun 2023 terealisasi sebesar Rp24.150,56 miliar (97,87%) meningkat sebesar 12,56%. Peningkatan Belanja Negara didorong oleh peningkatan penyaluran Belanja Pemerintah Pusat yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 30,49%, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tumbuh sebesar 4,13%;
- 4) Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp16.440,01 miliar (85,36%) berkontraksi sebesar -12,02%. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.244,51 miliar (84,09%) mengalami kontraksi -8,18%, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp13.129,47 (85,65%) mengalami kontraksi -12,87%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp66,03 miliar (92,65%) mengalami kontraksi -20,65%. Belanja Daerah telah terealisasi sebesar Rp17.746,07 miliar (84,44%) mengalami kontraksi -0,47%. Belanja Operasi berkontraksi sebesar -3,25% dengan realisasi sebesar Rp11.742,65

miliar (89,76%), Belanja Modal tumbuh positif 12,07% dengan realisasi sebesar Rp4.059,98 miliar (87,61%). Sementara itu, Belanja Tak Terduga terkoreksi negatif sebesar -72,99% dengan realisasi sebesar Rp10,31 miliar (7,99%) dan Belanja Transfer mengalami kontraksi sebesar -4,85% atau sebesar Rp1.933,14 miliar (60,95%).

- 5) Sektor unggulan memberikan kontribusi penerimaan perpajakan yang berbeda, dimana sektor pertambangan menyumbang penerimaan perpajakan yang signifikan sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan porsi penerimaan pajaknya cukup kecil. Hal ini disebabkan perbedaan tata kelola diantara dua sektor tersebut dimana rantai distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan relatif masih sulit untuk dilakukan identifikasi subjek pajaknya;
- 6) Sektor potensial di Provinsi Jambi adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; serta Sektor Jasa Perusahaan. Serapan tenaga kerja pada sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor pada tahun 2023 sebanyak 272 ribu orang, 15,11% dari jumlah 1,8 juta angkatan kerja di Provinsi Jambi dan merupakan sektor penyumbang pajak terbesar kedua dari struktur penerimaan pajak per lapangan usaha tahun 2023 di Provinsi Jambi sebesar Rp1,78 triliun.

b. Saran

Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya untuk mengembangkan sektor sekunder agar memiliki kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan. Dukungan dapat berjalan optimal dengan harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keselarasan pelaksanaan APBN dan APBD. Beberapa hal yang dapat kami rekomendasikan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat:

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran:
 - a. Mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan dengan memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan kolaborasi proyek strategis untuk memastikan keselarasan antara rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - b. Menganggarkan insentif dan fasilitasi bagi pengembangan kawasan industri di Provinsi Jambi, termasuk penyediaan pendukung diversifikasi ekonomi dan pemberian kemudahan investasi untuk mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan;

- c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya, guna mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal.
2. Aspek Pendapatan Negara dan Daerah:
 - a. Melakukan pengawasan dan pemantauan terkait Pendapatan Negara dan Daerah khususnya perpajakan dalam negeri melalui pelaksanaan koordinasi Kementerian Keuangan bersama dengan pemerintah daerah;
 - b. Melakukan optimalisasi Kelompok Kerja Penerimaan melalui Sekretariat Bersama untuk penggalian potensi perpajakan berdasarkan banyaknya data yang tersedia dari masing-masing instansi vertikal Kementerian Keuangan;
 - c. Melakukan penentuan proyeksi awal tahun yang lebih presisi dalam rangka meminimalisir pelaksanaan harmonisasi target penerimaan pajak di akhir tahun;
 - d. Melakukan koordinasi bersama dengan stakeholder dalam rangka mangakselerasi legalitas penentuan sumber-sumber baru dalam penggalian potensi pendapatan di daerah.
 3. Aspek Belanja Negara dan Daerah:
 - a. Melakukan monitoring dan menghimbau satker-satker yang mengalami pagu minus belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran untuk melakukan revisi setelah dibuka periode revisi terutama terkait dengan penyesuaian pagu untuk keperluan laporan keuangan;
 - b. Melakukan monitoring belanja sumber dana PNBP serta pemberian Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) sembari menunggu formula perhitungan minus tahun anggaran yang lalu dari pusat;
 - c. Mengawal beberapa proyek yang menggunakan rekening RPATA yang belum selesai agar dapat dilakukan monitoring terkait proyek-proyek yang belum selesai (masih ada saldo di RPATA) sampai dengan tanggal akhir pemberian kesempatan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
 4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan

Untuk merekam data surplus/defisit riil dari kebijakan fiskal regional, diperlukan data spasial pelaksanaan belanja baik Belanja Negara maupun Belanja Daerah, serta data penerimaan negara berbasis lokasi aktivitas ekonomi.

Pemerintah Daerah:

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran:

- a. Memperkuat kapasitas lembaga perencanaan daerah dalam mengimplementasikan pendekatan pembangunan berbasis data dan analisis risiko untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin timbul serta merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah;
- b. Menggalakkan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam penyusunan rencana pembangunan yang holistik dan terintegrasi guna memaksimalkan potensi ekonomi daerah serta mengatasi tantangan yang bersifat lintas sektoral;
- c. Memperkuat mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program perencanaan pembangunan ekonomi daerah guna mengidentifikasi potensi perbaikan, memastikan efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Aspek Pendapatan Negara dan Daerah:

- a. Melakukan sinergi dan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pengawasan dan pemantauan pendapatan di daerah;
- b. Melakukan identifikasi terhadap potensi sumber pendapatan daerah dan perluasan basis pajak, perbaikan administrasi dan sistem layanan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menyegerakan terbitnya aturan turunan atas UU HKPD terkait peraturan pajak daerah/retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan terwujudnya pertumbuhan tingkat kemandirian fiskal daerah;
- c. Melaksanakan akselerasi hilirisasi dan promosi produk unggulan dan pariwisata untuk mendorong kontribusinya dalam struktur perekonomian Provinsi Jambi karena sektor-sektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja serta menambah kawasan industri untuk hilirisasi.

3. Aspek Belanja Negara dan Daerah:

- a. Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan fungsi/urusan secara berkala yang dikoordinasikan oleh tim percepatan pelaksanaan anggaran daerah dalam rangka peningkatan akselerasi pelaksanaan anggaran di daerah.
- b. Melaksanakan rilis kinerja serapan anggaran di daerah secara periodik kepada masyarakat;

c. Melakukan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan anggaran daerah dan menetapkannya sebagai indeks kinerja utama.

4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

Melakukan penekanan besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) oleh pemerintah daerah dalam rangka memastikan APBD yang dirancang ekspansif (defisit) dapat direalisasikan sebagai pendorong perekonomian di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O; Johnson, D, *Macroeconomics*, Pearson
- Blöndal, J. R. 2001, 'Budgeting in Sweden', *OECD Journal on Budgeting*, vol. 1, no. 1, pp. 27-57.
- Dong Fu, Lori L Taylor, Mine K. Yucel (2003). *Fiscal Policy and Growth*. Research Departement Working Paper 0301.
- Irawan, M. Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6*. BFE-Yogyakarta: Yogyakarta
- N. Gregory Mankiw (2009). "Macroeconomics" Seventh Edition. Harvard University.
- Olivier Blanchard, David R. Johnson (2013). "Macroeconomics" Sixth Edition. Pearson Education Inc. 2013.
- Robert J. Barro and Xavier Sala-i-martin (2004). "Economic Growth" Second Edition. The MIT Press Cambridge, Massachusett.
- Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard (2011). "Macroeconomics" Eleventh Edition. McGraw-Hill International Editions
- Schick, A. 1996, 'The Spirit of Reform: managing the New Zealand state sector in a time of change', *Report prepared for the State Services Commission and the Treasury, Wellington, New Zealand*.
- Schick, A. 1998, 'Why most developing countries should not try New Zealand's reforms', *The World Bank Research Observer*, vol. 13, no. 1, pp. 123-131.
- Todaro, M.P, 1977, *Economics for a developing world : an introduction to principles, problems and policies for development*, Longman, London
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum



Kanwil Ditjen Perbendaharaan *Provinsi Jambi*

Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Telanaipura, Kota Jambi, 36122

Telp. (0741) - 668802 | Fax. (0741) - 668801

Email: kanwil.jambi@gmail.com

Website: djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi